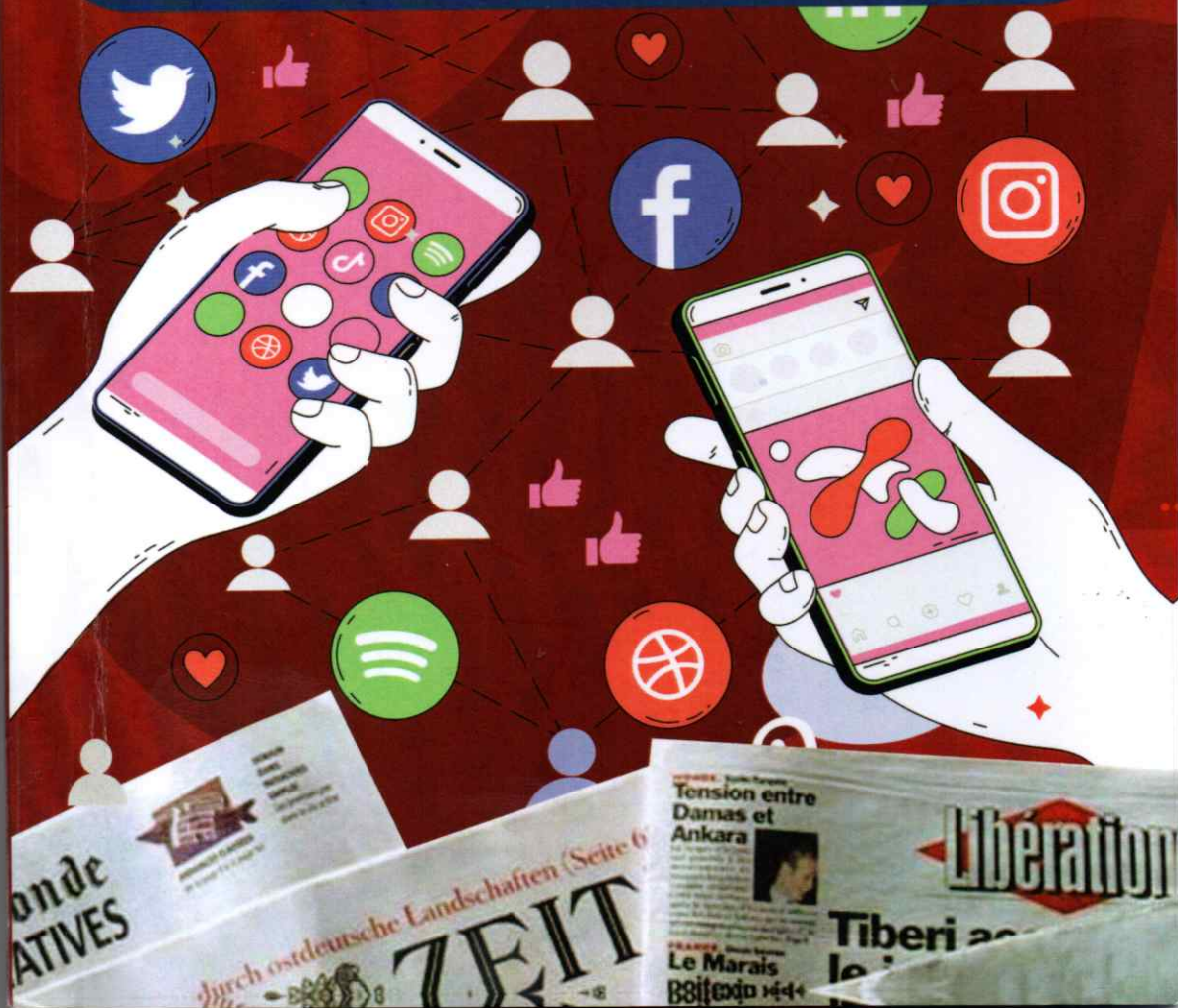


Dr. Marlinda Irwanti P., SE., M.Si

KOMUNIKASI ELIT POLITIK



KOMUNIKASI ELIT POLITIK

Penulis:

Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si.



Nizamia Learning Center

2021

KOMUNIKASI ELIT POLITIK

Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si.

© Nizamia Learning Center 2021

Anggota IKAPI

Register 166/JTI/2016

All right reserved

Penulis:

Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE., M.Si.

Tata Naskah:

Nurul Nur Komariyah

Tata Sampul:

M. Rifky Hadi S

Diterbitkan pertama kali oleh

Nizamia Learning Center

Ruko Valencia AA-15Sidoarjo

Telepon (031) 8913874

E-mail: nizamiacenter@gmail.com

Website: www.nizamiacenter.com

Cetakan pertama, Oktober 2021

xi + 132 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-265-631-4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala ucapan puja dan puji semata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas semua limpahan rahmat, hidayah dan maunah kepada hamba-hambanya yang selalu bersyukur.

Buku yang tengah anda baca ini diterbitkan sebagai ikhtiar penulis untuk memberikan sumbangsih literasi tentang studi komunikasi, khususnya model komunikasi yang digunakan dan dibangun oleh Elit politik di Indonesia. Komunikasi elit politik menjadi sangat penting untuk direkam dan dikemukakan karena satu sisi pesan-pesan yang disampaikan menyangkut kepentingan dan hajat khalayak ramai. Dan pada sisi yang lain, khalayak ramai senantiasa menjadi obyek komunikasi bagi kepentingan elit politik.

Dari berbagai kajian teori politik dan sosiologi, konsep Elit merujuk pada sekelompok kecil mereka yang memiliki kuasa, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Kelompok ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada rakyat jelata dan hak yang lebih besar daripada kelas masyarakat di bawahnya. Hegemoni Elit terhadap kelas khalayak ramai di bawahnya menjadi tanda keberadaan Elit. Politik hegemoni seakan menjadi model komunikasi Elit untuk mempertahankan kuasanya.

Pada perpektif inilah kehadiran buku ini menjadi lebih bermakna untuk menjelaskan bagaimana komunikasi itu dibangun dan dicipta sebagai kepentingan hegemoni dan mempertahankan kelas Elit.

Lebih mendasar buku ini juga menjelaskan bagaimana kritik terhadap berbagai teori Elit yang banyak dibincangkan dan

menjadi rujukan di berbagai negara-negara yang menjadikan demokrasi sebagai jalan subur membangun sistem politik.

Buku ini disusun dalam lima bab menjadi tema pokok bahasan. Pada bab pertama diperbincangkan tentang berbagai teori-teori klasik, neoklasik dan kontemporer tentang Elit politik. Pada bab kedua diperbincangkan Elit politik dan budaya politik di Indonesia. Pada bab ketiga dibahas tentang simbolisme dalam proses komunikasi politik Elit. Bab keempat dikaji secara mendalam tentang model komunikasi Elit politik. Dan bab kelima dikemukakan adanya gagasan untuk membangun media baru dalam komunikasi elit politik.

Media baru dengan ditandai perkembangan teknologi digital yang semakin masif, maka komunikasi Elit politik menjadi berubah, ada dampak positif dan negatif pada demokrasi. Dengan komunikasi memanfaatkan media sosial para kandidat dari Elit politik tidak secara langsung bisa mendengarkan aspirasi rakyat, tidak bersentuhan langsung dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ajaan tetapi bagi masyarakat di tingkat bawah mereka masih membutuhkan komunikasi langsung yang dapat melihat gerak tubuh, senyuman tatapan mata yang pasti berbeda dengan menggunakan media .

Apakah komunikasi Elit politik dengan menggunakan media baru dapat mengurangi "*money politics*" atau "*bargaining politik*". Bab terakhir itu menarik untuk didiskusikan lebih mendalam. Belum ada riset bagaimana demokrasi ke depan ketika semua menggunakan teknologi digital, apakah demokrasi semakin baik ?. Apakah mengurangi potensi *lobby politik* .

Biaya politik kemungkinan bisa menjadi murah, dibandingkan komunikasi konvensional, bagaimana kualitas politik dengan media baru .

Sangat diharapkan buku ini dapat menjadi awal diskusi yang hangat untuk mengkonstruksi elit politik yang lebih positif untuk pembangunan politik di Indonesia dan bagaimana memanfaatkan media dengan segala aspek perkembangan teknologi yang menyertainya. Kemanfaatan itu tentunya untuk membangun budaya politik yang mampu menciptakan demokrasi yang berkualitas dan sehat untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Disadari sepenuhnya bahwa buku ini memiliki banyak kekurangan baik dalam pengayaan gagasan maupun sumber-sumber literasi. Oleh karena itu sangat diharapkan buku ini dapat memantikan diskusi hangat dan dari bernas. Dan dari ruang diskusi ini dapat memberikan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini dimasa mendatang.

Secercah harapan dari buku ini sangatlah diinginkan dapat memberikan sumb angsih literasi khususnya kajian tentang elit poltiik yang agaknya masih belum banyak yang membahas dan menuliskannya secara khusus dalam teks book.

Diucapkan secara mendalam dan seluas-luasnya kepada para kontributor dalam penulisan buku ini.

Jakarta, 1 Oktober 2021

Dr. Marlinda Irawati Poernomo, SE., M.Si.

KATA SAMBUTAN

••
KETUA MPR RI

Tidak banyak buku yang secara khusus membahas tentang komunikasi elit politik, yang merekam bagaimana proses komunikasi dijalankan untuk membangun sinergitas politik dalam menjamin hak-hak politik rakyat memperoleh keadilan dan kesejahteraan.

Buku ini hadir dengan sebagai salah satu referensi untuk menemukan role model komunikasi Elit politik dalam iklim demokrasi di Indonesia. Model komunikasi politik yang diharapkan akan mampu mendorong kualitas demokrasi melalui berbagai saluran media yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tidak mengurangi hak-hak politik rakyat.

Kami menyambut baik kehadiran buku ini untuk mengawali ikhtiar membangun komunikasi politik dengan rakyat sebagai pemilik mandat untuk kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.

Jakarta, 8 Oktober 2021
Ketua MPR

H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A

KATA SAMBUTAN

• •

WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI

Membangun komunikasi politik bukanlah sesuatu hal yang mudah karena di dalamnya mengandung misi yang suci untuk mengubah cara berfikir yang tidak lagi meletakkan rakyat pemilik suara dalam sistem demokrasi sebagai obyek politik. Namun rakyat harus diberikan ruang sebagai subyek politik dalam proses komunikasi politik.

Buku ini ditulis dengan pengalaman panjang penulis sebagai seorang legislator dan juga pemikir sehingga buku ini memberikan warna tersendiri sebagai sumber literasi dalam membangun komunikasi politik dalam proses demokrasi di Indonesia.

Gagasan *role model* komunikasi politik yang memanfaatkan media dan kemajuan teknologi informasi untuk membangun budaya politik yang bermartabat patut kita apresiasi terhadap kehadiran buku ini.

Harapan kita ke depan buku ini dapat dilengkapi dengan kajian yang lebih mendalam berdasarkan data dan fakta-fakta di lapangan untuk dapat ditemukan berbagai faktor yang dapat mendukung keberhasilan komunikasi politik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang sehat dan seimbang untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia.

Jakarta, 8 Oktober 2021
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP.

KATA SAMBUTAN

— • • —
**KETUA KOMITE III, DPD RI,
PROF. DR. SYLVIANA MURNI**

Bangsa Indonesia saat ini sedang membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas. Untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas tersebut sangat diperlukan adanya proses komunikasi politik yang seimbang. Oleh sebab itu, komunikasi politik jangan hanya dipahami sesaat dalam perhelatan pesta demokrasi, yakni saat pilpres, pileg, dan pilkada. Namun yang lebih penting ialah mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri. Dan ini adalah tugas Elit politik sebagai seorang komunikator.

Persepsi masyarakat bahwa Elit politik lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan rakyat disebabkan oleh proses komunikasi politik yang tidak seimbang dan sesaat saja. Selain itu juga sudah makin menurunnya kepercayaan rakyat terhadap Elit politik karena kecewa dengan janji-janji politik saat pilkada atau pemilu. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak mungkin kualitas demokrasi semakin jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan budaya demokrasi yang saling tidak percaya, saling mencemooh, saling melecehkan, dan saling mementingkan ego kelompoknya daripada kepentingan bangsa dan negara.

Trust building sangatlah penting dalam berdemokrasi. *Trust building* merupakan hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi, karena itu menyangkut membangun peradaban. Membangun suatu nilai-nilai budaya yang sehat, berkeadilan dan berkualitas mengiringi tumbuhnya masyarakat

yang demokratis. Tanpa adanya *trust building* akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat yang pada ujungnya akan menimbulkan konflik di masyarakat yang berkepanjangan yang dapat membuat persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa terancam. Padahal pesta demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Semakin demokratis masyarakat semakin sehat iklim politik, semakin tereleminir konflik sosial, dan semakin kuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Saya menyambut baik hadirnya buku Komunikasi Elit Politik, yang tidak saja memperkaya literasi pembangunan politik di Indonesia. Namun juga sebagai salah satu sumbangsih pemikiran untuk membangun *trust building*.

Buku ini menarik untuk didiskusikan sebagai upaya membangun *trust building* dalam iklim demokrasi ini. Pemerintah, Elit politik, dan pemangku kepentingan lainnya perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya, baik komunikasi antar Elit, komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat sebagaimana hal yang dipersoalkan dalam buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kemajuan demokrasi dan budaya politik yang sehat dan berkualitas di Indonesia. Tentunya saya juga sangat berharap agar penulis terus melengkapi buku ini dengan dengan berbagai hal yang terkait dengan bagaimana membangun strategi komunikasi politik yang berhasil untuk mencapai tujuan *trust building*.

Jakarta, 10 Oktober 2021
Anggota DPD RI

Prof. Dr. Sylviana Murni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
KATA SAMBUTAN	
Ketua MPR RI.....	vii
Wakil Ketua Komisi X DPR RI.....	viii
Ketua Komite III, DPD RI, Prof. Dr. Sylviana Murni.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1. MEMAHAMI TEORI ELIT DALAM POLITIK	
A. Kritik Empat Madzhab Teori Elit.....	1
B. Teori Elit Charles Wright Mills: Dominasi Tiga Kelompok.....	13
C. Teori Elit Robert Michels : <i>The Iron Law of Oligarchy</i>	19
D. Teori Elit Gaetano Mosca: <i>The Ruling Elite</i>	24
E. Teori Elitis Vilfredo Pareto: Sirkulasi Elit.....	33
F. Media dan Hegemoni Elit Politik.....	37
BAB 2. ELIT POLITIK DI INDONESIA DAN BUDAYA POLITIK	
A. Perilaku Politik.....	41
B. Demokrasi dalam Penyelenggaraan Negara.....	43
C. Budaya Politik yang Ideal.....	45
D. Budaya Politik Indonesia.....	49
E. Membangun Gerakan Budaya Politik Indonesia	51
BAB 3. PENGGUNAAN SIMBOL-SIMBOL DALAM PROSES KOMUNIKASI ELIT POLITIK	
A. Hakikat Manusia dan Simbol-Simbol Kekuasaan.....	56

B. Simbolisme Komunikasi Politik.....	59
C. Media Komunikasi Politik	64
D. Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Politik...	66

**BAB 4. MODEL KOMUNIKASI ELIT POLITIK
DI INDONESIA**

A. Model Komunikasi Transaksional.....	72
B. Model Komunikasi Kegaduhan.....	78
C. Model Komunikasi Virtual.....	80

BAB 5. MEDIA DAN KOMUNIKASI ELIT POLITIK

A. Lahirnya Media Baru	88
B. Media dan Demokrasi	90
C. Ruang Publik dan Deliberasi Politik	94
D. Platform Media Baru Interaktif.....	105
E. Ruang Publik Baru di Indonesia	106
F. Transformasi Komunikasi Politik.....	108
G. Komunikasi Politik Transformatif di Indonesia	112
H. E-Government : Government to Citizen.....	113

REFERENSI	125
BIOGRAFI PENULIS	131

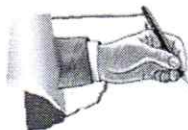
MEMAHAMI TEORI ELIT DALAM POLITIK

A. Kritik Empat Madzhab Teori Elit.

Teori Elit dalam politik adalah sebuah teori politik yang memandang Elit sebagai aktor politik inti di setiap masyarakat yang terstruktur secara hirarkis. Dengan demikian Elitisme (paham tentang adanya kaum elit) berarti cara yang berguna untuk mengidentifikasi dan mempromosikan aneka kondisi yang menguatkan efektivitas Elit.

Anthony Harold Birch memandang Elitisme adalah teori yang melihat masyarakat selalu diperintah oleh kaum elit yang berasal dari kelompok atau kelas tertentu (Birch, 2001:186). Menurut Birch, studi Elitisme terbagi dua: Pandangan NonMarxis dan Marxis. Bagi Birch, untuk disebut sebagai teori Elit yang lengkap, baik ontologi maupun epistemologinya, adalah teori Elit dari pandangan kaum Marxis. Teori Elit dari kalangan non Marxis tidak bisa disebut teori secara penuh.

Birch menyatakan bahwa Elitisme dalam politik yang kerap disebut sebagai "teori Elit" (Pareto, Mosca, Michels, dan Mills) secara metodologis sesungguhnya tidak mencukupi untuk disebut demikian. Keempatnya berbeda dalam hal ontologi dan epistemologi. Sebaliknya, kaum Marxis tentang Elit yang muncul



dari kelas penguasa, yang didasarkan atas determinisme ekonomi punya ontologi dan epistemologi yang jelas: Elit selalu berasal dari kelas borjuis lalu bermetamorfosis menjadi kelas kapitalis. Birch menggunakan 3 proposisi elit yang disusunnya untuk mengkritik keempat teoretikus Elit Pareto, Mosca, Michels, dan Mills.

Birch terlebih dahulu mengajukan tiga proposisinya sendiri mengenai Elitisme politik, yang kemudian ia gunakan untuk mengevaluasi pandangan Elitisme dari keempat tokoh yang dibahasnya, yaitu :

1. Proposisi A: Bahwa akses ke jabatan politik hanya terbatas pada anggota kelompok sosial kohesif dan relatif kecil, mereka punya kepentingan dan nilai identik yang berdampak politik, dan tidak merefleksikan kepentingan dan nilai mayoritas warga negara (Birch, 2001 : 187)
2. Proposisi B: Pemegang jabatan pemerintahan jarang responsif terhadap pandangan dan kepentingan publik secara umum (Birch, 2001 : 187).
3. Proposisi C: Pemegang jabatan, kendatipun tidak mencari kepentingan pribadi, secara teratur mengambil keputusan demi kepentingan kelas atau kelompok warga negara yang relatif kecil (Birch, 2001 : 187).

Catatan penting dari kritik terhadap keempat teoretikus Elit tersebut di atas, bahwa menurut Birch keempat teoretisi Elit tersebut heterogen. Tidak seorang pun berkontribusi teori yang mampu mengancam teori Demokrasi, bahwa demokrasi tidak lebih sebagai pemerintahan oleh segelintir Elit. Pareto



menawarkan kerangka konseptual, bukan teori. Mosca adalah anasir Liberal abad ke-19 yang lebih mungkin membela gagasan demokrasi apabila hidup di masa kekinian. Michels sekadar menulis tentang aneka dilema ideologis Partai Sosial Demokrasi Jerman ketimbang tentang prosedur-prosedur demokrasi. Mills sekadar menulis tentang apa itu Amerika dari seorang yang begitu teralienasi dari masyarakat Amerika, memusuhi aneka nilainya, aneka kebijakannya, sistem ekonominya, dan kondisi Amerika secara umum.

Namun demikian, secara umum keempatnya memberikan rangkuman bahwa Elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di banyak bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elite. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Dalam pengertian sosiologis dan politis, Elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa Elite adalah produk dari masyarakatnya. Dan, hubungan antar Elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun



semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuknya yang baru oleh generasi berikutnya (Anshoriy, 2008:04).

Elit politik didefinisikan sebagai kelompok individual, yang jumlahnya kecil, komunitasnya relatif kohesif, stabil, dengan mana mereka yang memiliki kekuasaan disproporsional untuk mempengaruhi *outcome* politik nasional dan supranasional secara berkelanjutan (Best and Higley, 2018:3). Namun, Birch hanya mengkritisi 4 eksponen teori Elit klasik, tidak menguji teori Elit yang masuk kategori Neo-Elitisme dan Demo-Elitisme.

Elemen awal teoretisi Elit klasik sekaligus melakukan kritik atas visi kaum Marxis-Sosialis tentang masyarakat egalitarian yang utopis serta kaum Liberal dengan demokrasi puritannya yang pragmatis (Pakulski, Best and Higley, 2018:10). Bagi teoretisi Elit, kedua kaum itu melontarkan gagasan yang dilutif, menipu, dan dapat berbahaya. Kaum Marxis-Sosialis dikritik karena masyarakat egaliter yang paripurna (mencakup seluruh warganegara tanpa kecuali) tidak pernah ada dalam sejarah dan sebab itu dikatakan sebagai penipuan. Kaum Liberal dikritik sebagai berbahaya karena visi mereka tentang demokrasi murni tanpa Elit akan berakibat anarki. Inilah titik tolak pandangan teoretisi elit klasik.

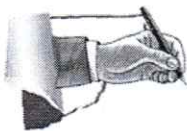
Teori Elit klasik ditantang oleh dua teori baru: Pada perkembangannya, teori Elit terbagi menjadi dua: Neo-Elitisme dan Demo-Elitisme. Neo-Elitisme dekat dengan pemikiran Pareto dan Mosca, sementara Demo-Elitisme dekat dengan pemikiran Weber dan Schumpeter.



Neo-Elitisme menekankan pentingnya otonomi Elit sebagai syarat agar posisi mereka secara politik dapat efektif. Ini penting mengingat tidak terelakkannya konsentrasi *power* di tangan para Elit, kepentingan pribadi para individu ataupun kelompok Elit, dan kebutuhan serta perlindungan atas perbedaan pola interaksi Elit yang dapat atau tidak dapat disediakan oleh para individu ataupun kelompok Elit (Pakulski Best and Higley, 2018:13). Bagi kalangan Neo-Elitisme seluruh rezim politik aktual selalu dipimpin Elit politik yang secara jumlah kecil dan kepentingan para elit ini selalu berbeda dengan warga negara biasa.

Neo-Elitisme tidak anti demokrasi dan justru mereka menggunakan definisi prosedural demokrasi sebagai titik awalnya pembangunan teorinya. Namun, demokrasi prosedural dianggap sekadar sebagai ajang kompetisi para Elit untuk memimpin negara atau pemerintahan. Setelah mereka duduk di kursi kekuasaan, penerjemahan kepentingan para pemilih sepenuhnya ada di tangan mereka. Neo-Elitisme berusaha melakukan rekonsiliasi terhadap konsep demokrasi, yang digunakan untuk membenarkan bahwa Elit tidak ujug-ujug muncul, karena para Elit ini dipilih sendiri oleh warganegara (Best and Higley, 2018:47-8). Praktek demokrasi apapun juga pasti akan menghasilkan Elit, apapun alasannya.

Di lain pihak, Demo-Elitisme menekankan *power* dan aliansi resiprokal antara Elit dan non Elit, baik aliansi tersebut bersifat *top-down* atau *bottom-up*. Demo-Elitisme memandang Elit sebagai penjaga lembaga demokrasi dan *polyarchies of merit*



yang kompetitif (Pakulski dalam Best and Higley, 2018:13). Bagi Demo-Elitisme, demokrasi dianggap cocok dengan pemerintahan oleh para Elit atas tiga asumsi. Pertama, kaum demokrat mengakui kekuasaan dan otonomi relatif para Elit yang menjadi pemimpin politik. Kedua, pemimpin yang menjadi Elit tersebut, sekurangnya di sistem parlementarian, harus menjalin aliansi dengan aneka kategori warga negara. Salah satu eksponen Demo-Elitisme, Karl Popper, menerjemahkan demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan akan hadirnya *counter* Elit yang mampu memobilisasi suara rakyat guna menumbangkan penguasa inkumben secara damai (Körösenyi dalam Best and Higley, 2018:47-8).

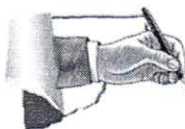
Elite politik sendiri dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan partai politik (Varma, 1987:2030). Sedangkan Elite Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: Elite keagamaan, Elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe Elite lokal ini diharapkan selain dapat



membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar Elite politik maupun elite masyarakat dalam proses pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. Dalam sirkulasi Elite, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi Elite menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara Elite dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda kedalam kelompok elite yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok Elite baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan Elit yang sudah ada (Anshoriy, 2008:040).

Elite adalah orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari para pengacara, mekanik, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elite yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu pada umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan pandai, mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral, dan sebagainya.

Menurut Karl Marx, Elite politik terdapat tiga macam, diamana elite dapat berubah dengan melalui revolusi. Diantaranya: Pertama, Metode Posisi, Elite politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam sistem



politik. Jabatan strategis yaitu dapat membuat keputusan dan kebijakan dan dinyatakan atas nama Negara. Elite ini jumlahnya ratusan mencakup para pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, perpol, kelompok kepentingan. Para elite politik ini setiap hari membuat keputusan penting untuk melayani berjuta-juta rakyat. Kedua, Metode Reputasi, elite politik ditentukan berdasarkan reputasi dan kemampuan dalam memproses berbagai permasalahan dan kemudian dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Ketiga, Metode Pengaruh, Elite politik adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh pada berbagai tingkatan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elite politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai Elite politik.

Menurut Keller, Elite pada mulanya dipakai untuk membedakan minoritas-minoritas personal yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial yang pada gilirannya bertanggung jawab terhadap realisasi tujuan-tujuan sosial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial dengan mencakup penyertaan pada suatu proses sosial yang berlangsung dan sementara yang artinya tidak sama dengan mempertahankan hidup sehingga terdapat kemungkinan untuk tergantikan.

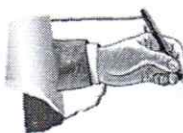
Sebagai orang-orang pilihan atau terpilih, Elite mempunyai posisi tertentu yang memberikan kekuasaan menentukan dalam



suatu proses pengambilan keputusan. Pareto menjelaskan Elite dalam masyarakat berada pada lapisan atas yang terbagi menjadi Elite yang memerintah (*governing elite*) dan Elite yang tidak memerintah (*non governing elite*), sedangkan dalam masyarakat juga terdapat lapisan yang lebih rendah (*non elite*).

Menurut Aristoteles, Elite adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Anshoriy, 2008: 340).

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan Elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elite adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya Elite berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang muasik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama Elit yang memerintah (*governing elite*) dan Elite yang tiak memerintah (*non governign elite*).



Kedua, lapisan rendah (*non-elite*) kajian tentang elite politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori Elite politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu : (1). Lapisan atas, yaitu Elite, yang terbagi ke dalam Elit yang memerintah (*governing elite*), dan Elit yang tidak memerintah (*non-governing*). (2). Lapisan yang lebih rendah, yaitu non-Elite.

Konsep pergantian Elite juga dikembangkan oleh Pareto. Ia mengemukakan berbagai jenis pergantian elite, yaitu pergantian: (1). Diantara kelompok-kelompok Elite yang memerintah itu sendiri. (2). di antara Elite dengan penduduk lainnya. Pergantian yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (1). individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada. (2). individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok Elit baru dan masuk ke dalam suatu kancah perebutan kekuasaan dengan Elit yang sudah ada.

Pareto dan Mosca mendefinisikan Elite sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam



masyarakat. Definisi ini kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa "hukum besi oligarki" tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elite sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran Elit tidak terlalu menonjol dan status Elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetulan punya peran penting (Anshoriy, 2008 : 35).

Pareto dan Mosca juga menyebutkan dalam masyarakat selalu terbentuk kelas yang terbagi menjadi kelas yang memerintah dengan jumlah yang kecil dan memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan mampu mencapai tujuan-tujuan keuntungannya dengan kekuasaan yang dimiliki, dan kelas yang diperintah dengan jumlah yang lebih besar dan diatur serta dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Pemaparan Pareto dan Mosca memiliki celah lemah yang cukup mengaburkan pemahaman Elite karena tidak memperhatikan bidang interaksi lain dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pada masanya kedua pemikir ini melihat dominasi negara yang begitu kuat atas rakyat.

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang Elite. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, Elite diperlukan sebagai



sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elite dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, Elite dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian Elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figure sentral (Mattei, 2003:90).

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa Elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elite sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota Elite itu sendiri, apa lagi dengan elite yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elite itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi Elite.

Pemikir lain yang ikut mengklasifikasikan dan mendefinisikan Elite adalah Robert Michels yang mengemukakan tentang "hukum besi oligarki", yakni kecenderungan dominasi (penguasaan) oleh sekelompok kecil orang (minoritas). Oligarki ini muncul dalam empat dimensi politik, yaitu, oligarki dari segi organisasi, oligarki dalam



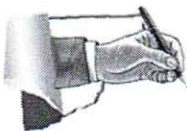
kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat, dan oligarki dalam kekuasaan pemerintahan.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa Elite memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki atau bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senada juga diungkapkan oleh Charles F. Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni : sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.

B. Teori Elit Charles Wright Mills : Dominasi Tiga Kelompok.

Kajian Charles Wright Mills, tentang kelompok elit yang berkuasa terdiri atas orang-orang yang menduduki posisi dominan, yaitu di bidang politik, militer, dan ekonomi. Menurut Mills ada tiga kelompok Elit sosial. Memang, kajian yang dilakukan Mills dalam *The Power of Elite* pada saat itu menggambarkan kondisi masyarakat Amerika. Amerika yang dikenal sebagai negara adidaya, ternyata sebagai negara besar tidak lepas dari pengaruh dominasi kelompok Elit. Menurut Mills ada tiga kelompok Elit sosial.

Mereka berkuasa, terdiri atas orang-orang yang posisinya dominan baik itu dalam bidang politik, ekonomi, militer, serta



yang terlibat dalam pengusaha, penguasa, dan petinggi militer. Tiga lembaga ini menurut Mills semakin lama semakin terkonsentrasi dan saling berinteraksi. Akibat dari hal ini menurut Mills ada dua: Pertama, kekuasaan (*power*) di setiap domain semakin dipegang oleh sedikit orang. Kedua, terdapat kecenderungan *powerful few*, untuk saling berkomunikasi satu sama lain (lintas domain) dan saling berganti peran dengan berpindah antar domain (Birch, 2001:199). Amerika tahun 1950an didominasi oleh *power* elit, yaitu individu berkuasa yang tidak bisa lagi disebut sebagai demokratis. Elit ini tidak lagi menganggap demokrasi sebagai suatu hal penting.

Menurut Birch, Mills berbeda dengan kaum Marxis, karena ia menolak sejarah sekadar produk kekuatan sosial. Bagi Mills, sejarah dibentuk oleh individu manusia yang memegang posisi kekuasaan. Di Amerika sendiri, menurut Mills, individu ini berasal dari kalangan atas. Bukunya *Power Elite*, menurut Birch, sekitar 40%nya berisikan narasi jurnalistik tentang gaya hidup para individu ini (Birch, 2001:199). Maksud Mills menulis gaya hidup ini adalah mengkaitkan antara kesatuan aspek sosial dan psikologis yang memberi ciri khas atas keputusan yang diambil oleh para Elit. Anggota Kongres tidak dimasukkan Mills ke dalam Elit ini karena mereka sekadar mewakili kepentingan lokal, dan kurang terorganisir dan terinformasikan secara baik manakala ada isu-isu nasional.

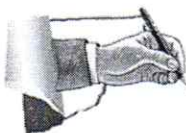
Power yang dimaksud Mills diartikan sebagai kekuasaan eksekutif (Birch, 2001:200). Mills lebih menekankan kekuasaan eksekutif di bidang kebijakan pertahanan dan luar negeri. Mills



tidak percaya argumen Marxis tentang ekonomi sehingga kaum korporasi kaya hanya dimasukkan Mills ke dalam triuviratnya manakala mereka menduduki posisi pemerintahan (eksekutif) puncak (Birch, 2001:200). Birch menilai kajian Mills mengenai kelompok Elit Amerika ini masuk ke dalam Proposisi A, bahwa yang masuk ke dalam posisi puncak kekuasaan terbatas pada anggota dari kelas sosial yang kohesif dan berukuran kecil (Birch, 2001:200). Mereka ini berasal dari kelas atas. Birch coba membantah tesis Mills seputar asal-usul kelas para Elit dengan merujuk salah satu triumvirat *power* Elit yaitu Presiden.

Menurut Birch hanya 2 dari 10 presiden Amerika pasca Perang Dunia yang berasal dari kelas atas yaitu Kennedy dan Bush. Ke-8 lainnya yaitu Truman, Eisenhower, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, dan Clinton berasal dari level atas *lower-middle class* atau *middle-class* (Birch, 2001:200). Manakala kasus Mills dimasukkan Birch ke dalam Proposisi B, bahwa pembuat keputusan puncak memformulasi kebijakan menurut kepentingan dan nilai mereka sendiri, tanpa memandang kepentingan publik secara umum. Mills menekankan bahwa mereka (para elit ini) seolah terputus dari opini publik dan dari waktu ke waktu mengambil keputusan tanpa melakukan debat publik terlebih dahulu.

Mills mencontohkan keputusan 'otoriter' ini adalah keputusan Roosevelt ikut serta dalam Perang Dunia II, keputusan Truman menggunakan bom atom atas Jepang, keputusan Amerika untuk tidak mempertahankan dua pulau lepas pantai di dekat Cina kendati ada kemungkinan Cina



melakukan invasi, dan keputusan tidak menggunakan senjata nuklir tahun 1954 untuk menyelamatkan tentara Perancis yang dikepung di Vietnam (Birch, 2001:220-1). Birch kemudian membantah bahwa keputusan-keputusan para presiden tersebut, apabila pun dilakukan debat publik, akan disetujui, dan mengenai mengapa dilakukan seolah sepihak, Birch menyatakannya karena urgensi semata keputusan militer yang harus diambil secara cepat. Birch menilai bahwa Mills gagal menunjukkan bukti agar memenuhi Proposisi B yang ia ajukan (Birch, 2001:201).

Hal berharga yang bisa diambil dari studi Mills adalah bahwa etos Elit bisnis punya pengaruh yang tidak semestinya atas pembentukan nilai dan opini Amerika. Anggota Elit ini kenal satu sama lain sebagai teman, tetangga ataupun anggota klub. Posisi mereka lebih penting sebagai pemimpin opini informal ketimbang anggota militer ataupun organisasi politik (Birch, 2001:201). Mereka juga, lanjut Mills, secara kolektif menerapkan derajat kekuasaan dalam melakukan manipulasi, sehingga nilai-nilai korporatnya merasuki mereka yang punya pengaruh di bidang politik ataupun keputusan-keputusan ekonomi. Birch menutup kajiannya mengenai Mills dengan menyatakan bahwa kendati kontribusi utama Mills bukan pada teori Elit, tetapi ia menyumbang informasi seputar fitur khusus dari masyarakat Amerika.

Menurut Mills, ketiga kelompok Elit (politik, ekonomi, dan militer), mereka saling bekerjasama untuk mempertahankan dan menguatkan posisi dominasinya. Maka, tidak heran, kalau ada seorang pejabat tinggi militer bisa menjadi kapitalis, dan



seorang kepala pemerintah dari sipil menerapkan gaya pemerintahan seperti militer.

Mills mengatakan, bahwa kekuasaan Elit dengan bentuk piramida kekuasaan, yaitu bagian paling puncak diduduki Elit berkuasa. Elit yang berkuasa tadi menguasai tiga sektor, yaitu sebagai berikut :

- Lapis pertama adalah pengusaha, penguasa dan militer
- Lapis kedua adalah pemimpin opini lokal, cabang legislatif pemerintah, dan beragam kelompok berkepentingan.
- Lapis ketiga adalah orang tidak memiliki kekuasaan dan orang yang tidak terorganisasi baik secara ekonomi dan politik.

Menurut Mills, dominasi dan mengguritanya kelas elit di Amerika, merupakan perkembangan yang cukup baru, pada era sebelumnya belum ditemukan. Beberapa keputusan penting di negara Adidaya sering tidak menggambarkan apa yang menjadi kesadaran kolektif masyarakat, lebih mementingkan kepentingan Elit sosial. Malah lebih mementingkan kepentingan Elit sosial, seperti mengalihkan isu nasional menjadi isu internasional. Salah bentuk dominasi kelas Elit itu, bagaimana mereka berusaha memperoleh dukungan politis rakyat demi kepentingan mobilitas vertikal mereka secara ekonomi dan politik.

Tiga dominasi Elit kata Mills, mengingatkan kita pada fenomena elit di Indonesia saat ini. Fenomena saling mempertahankan, memperkuat, dan melindungi kekuasaan oleh para elit yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya pada UU



MD3 yang baru saja diberlakukan di Indonesia. Pasal-pasal yang menjadi kontroversi dan dianggap melindungi serta membuat anggota dewan kebal terhadap hukum dan antikritik.

Kisruh antar Elit, dan perang kepentingan, sehingga kata sepakat adalah jalan akhir untuk mengakhiri kisruh yang ada. Terbukti, dengan adanya UU MD3 dan ada penambahan pimpinan di parlemen. Kisruh pun selesai. Inilah yang dikatakan oleh Mills, ketiga Elit, baik yang dibidang politik, militer dan pengusaha, bersama-sama melindungi kekuasaan mereka sebagai Elit. Partai politik, dan para pejabat politik juga bermain peran dalam melindungi kepentingan partai dan Elitnya. Bagaimanakah Elit dapat muncul menjadi kelompok kuasa dan mampu melakukan kompromi kepentingan seperti fenomena penyelesaian kisruh UU MD3 di atas ?. Hal ini oleh Mills disebabkan setidaknya dua faktor yang memunculkannya yaitu : Pertama, alat kekuasaan dan kekerasan yang sudah melebur. Dan kedua, sifat yang saling tergantung antara Elit yang dikontrol kaum Elit yang di atas. Bagaimanakah Elit kuasa mampu mencipta suatu hegemoni dan mempertahankannya ?. Hal ini menurut Mills disebabkan oleh adanya kesadaran kohesif Elit. Kesadaran kohesif ini bisa bersatu karena ada tiga faktor, yaitu : (1) kesamaan psikologis, (2) kesamaan kepentingan, dan (3) interaksi sosial.

Tidak hanya itu, dominasi Elit juga telah dilakukan pada media massa yang merupakan sebagai alat mereka untuk mendominasi masyarakat. Pada saat sekarang media massa mempunyai posisi, serta peran strategis dalam menyampaikan isu-isu nasional. Isu-isu itu mereka (Elit yang mendominasi)



disampaikan pada media massa sebagai alat bagi Elit dalam meraih dukungan kekuasaan. Dengan semakin aktifnya Elit menyampaikan informasi di media massa, akan memberikan dampak positif dan menjadi keuntungan mereka dalam menggiring opini.

Dominasi Elit sosial yang dimiliki oleh mereka yang duduk dalam kekuasaan, baik itu mereka yang berkuasa pada bidang politik, ekonomi, dan petinggi militer, akan mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi mereka. Sebagai penguat contoh, yaitu Pengesahan UU Omnibus Law yang mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena dianggap cacat, dan hanya mementingkan kaum elit saja, buruh malah dikesampingkan. Dan ramai-ramai media massa menggiring opini serempak mendukung kepentingan pengesahan UU Omnibus Law. Ini menjadi bukti, bahwa kajian Mills tentang kuasa elit masih relevan untuk kajian elit politik di Indonesia, baik elit kuasa di tingkat pusat maupun di tingkat lokal atau daerah.

C. Teori Elit Robert Michels : *The Iron Law of Oligarchy*

Menurut Birch, Michels seorang Sosialis radikal yang kecewa akibat pandangan politik yang ia miliki menjadi penghalang untuk menempati jabatan di sejumlah universitas Jerman, kendati sesungguhnya ia memenuhi kualifikasi (Birch, 2001:194-5). Bukunya *Political Party* memuat serangannya bukan pada pemerintah dan universitas yang menolak dirinya memperoleh jabatan tertentu, melainkan terhadap pola kepemimpinan di SPD



(*German Social Democratic Party*) dan kecenderungan oligarki di partai-partai lain secara umum.

Dalam bagian pertama bukunya, Michels menyatakan apapun ukurannya, birokrasi dan oligarki tidak bisa dihindari oleh partai politik. Partai juga harus punya *organizer* profesional dan pemimpin. Agar berhasil dalam sistem pemerintahan perwakilan, pemimpin tersebut diberi kebebasan bermanuver politik dan partai yang tengah berjuang perlu struktur yang hirarkis (Michels dalam Birch, 2001:195).

Dalam bagian kedua bukunya, Michels bicara tentang sebab psikologis munculnya pemimpin. Michels secara sinis memandang kapasitas politik massa, (termasuk anggota partai sendiri) yang baginya, mereka tidak berpengalaman, kurang terdidik, apatis, dan inferior terhadap pimpinannya. Michels melanjutkan 'ketidakkompetenan massa dalam kehidupan politik hampir bersifat universal, dan disinilah fundasi kuat kekuasaan para pemimpin partai (Michels dalam Birch, 2001:195). Demokratis dalam pemahaman Michels adalah kumpulan rakyat, bukan proses demokrasi ataupun sistem pembuatan keputusan yang demokratis (Birch, 2001:194).

Bagi Michels, bukan hanya pemimpin partai saja yang memposisikan diri mereka di atas pengikutnya, melainkan juga wakil-wakil terpilih pun melakukan hal serupa. Anggota Parlemen menjadi arogan, membuat deal politik dengan partai-partai lain, dan mengorbankan garis ideologis partai demi mengembangkan basis pemilih mereka (Birch, 2001:195). Birch menganggap menarik pemilih yang justru penting di dalam



Demokrasi tidak terbersit dalam pikiran Michels. Perhatian utama Michels, menurut Birch, pada demokrasi di dalam partai ketimbang demokrasi di dalam sistem politik secara luas.

Contoh kasus yang diberikan Michels mayoritas diambil dari partai-partai Sosialis dan serikat buruh di Eropa Barat, dan banyak diantaranya berasal dari SPD (partainya sendiri) (Birch, 2001:195). Saat Michels menulis, SPD secara formal berkomitmen pada serangkaian tujuan Marxis, tetapi pimpinannya 'menerima rezim politik, ekonomi dan sosial yang berlaku.' Diskrepansi antara tujuan partai dan praktik politik pemimpin SPD ini yang disebut Michels sebagai tidak demokratis (Michels dalam Birch, 2001:195). Pada titik ini Michels bukan bicara sebagai teoretisi melainkan aktivis partai.

Bagi Birch, sehubungan dengan proposisinya, maka Michels dapat dimasukkan ke dalam Proposisi B, bahwa anggota dari Elit partai mengganti nilai dan strategi mereka sendiri dengan yang kemungkinan besar bisa diterima oleh massa (Birch, 2001:196). Namun, bagi Birch, jika Michels hendak mempertahankan pandangan bahwa pemimpin partai itu Elitis, maka ia harus membuktikan bahwa jajaran anggota partai (selain para Elit pemimpin) dalam kondisi tetap berpegang pada prinsip dasar partai. Michels tidak menunjukkan hal tersebut dan sebab itu sulit menyatakan bahwa pandangan si pemimpin partai Elitis (berbeda dengan anggota partai biasa lainnya). Birch menyimpulkan bahwa Michels gagal menemukan kasus Elitisme dalam argumentasinya mengenai pemimpin partai ini (Birch, 2001:196).



Di akhir bukunya, catat Birch, Michels membangun dua proposisi umum dan berstatus *scientific law* berdasarkan *analytic explanation* (Michles dalam Birch, 2001:196). Pertama, bahwa setiap partai politik membangun organisasi dan siapapun bicara organisasi, maka ia bicara adanya Oligarki. Kedua, Oligarki bermakna kepemimpinan dan setiap sistem kepemimpinan Oligarki tidak cocok dengan postulat esensial Demokrasi (Birch, 2001:196-7). Birch membantah proposisi pertama dengan menyatakan bahwa tidak salah suatu partai punya birokrasi dan sekelompok pemimpin. Birch juga membantah proposisi kedua bahwa mereka (sekelompok pemimpin) ini baru bisa disebut tidak demokratis apabila gagal merefleksikan pandangan para anggotanya atau tidak mampu menjawab pertanyaan mereka seputar tindakannya.

Michels, bagi Birch, tidak bisa membuktikan kedua proposisinya, bahkan di dalam kasus SPD sekalipun. Bahkan, lanjut Birch, andaipun terjadi ketidakdemokratisan di dalam partai, tidak lantas membuat sistem pemerintahan di mana terjadi persaingan antar partai menjadi tidak demokratis (Jerman saat itu bersistem multi partai, termasuk juga ada Partai Komunis).

Michels sendiri bagi Birch kurang familiar dengan makna demokrasi dalam kehidupan politik Jerman mengingat negara tersebut baru menerapkan pemerintahan demokratis yang bertanggung jawab 9 tahun setelah Michels menerbitkan bukunya. Sebelum 1919, di Jerman memang sudah terdapat pemilu berdasarkan kompetisi antar partai politik, tetapi



pemerintahan yang terbentuk belumlah bertanggung jawab pada parlemen. Birch menyayangkan Michels yang tidak melakukan studi di Inggris, negara-negara Skandinavia, Australia, dan Selandia baru yang telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada parlemen (Birch, 2001:197)

Birch mempertanyakan apakah yang diinformasikan Michels mengenai Elitisme (Birch, 2001:198). Perlu dicatat bahwa partai politik perlu pimpinan, dan pimpinan ini harus punya pengetahuan dan pengalaman politik yang lebih ketimbang pengikutnya. Pimpinan ini boleh saja memiliki kemampuan menyusun ulang kebijakan partai dengan tujuan bertarung demi memperoleh dukungan para pemilih. Bukan masalah Konservatif atau Liberal, melainkan pimpinan partai sekadar memoderasi kebijakan radikal dari tujuan-tujuan politik mereka dari mana partai ini berasal. Mengenai ini, apa yang dinyatakan Michels sekadar klaim, bahwa tindakan-tindakan pimpinan partai ini disebut sebagai tidak demokratis.

The iron law of oligarchy yang terkenal, yang dihasilkan Michels, bagi Birch adalah tetap kurang signifikan keberlakuannya ketimbang yang diduga oleh para pengagumnya (Birch, 2001:198). Ini akibat pernyataan-pernyataan Michels atas oligarki yang dipraktekkan pimpinan SDP merupakan hal lumrah di dalam politik. Pimpinan partai mungkin adalah pihak yang paling tahu kondisi di parlemen dan masalah-masalah pemerintahan, yang lalu melakukan manuver politik. Dalam membenarkan manuver ini, agar diterima anggota lainnya, ia

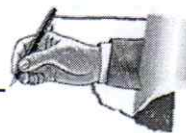


harus berargumentasi terlebih dahulu dengan mereka. Argumentasi antara pemimpin dan anggota ini membuat hukum besi oligarki elit partai Michels gugur dengan sendirinya.

Michels hanya melakukan generalisasi atas satu kasus (SPD), dan andai kata pun konklusinya benar, *the iron law of oligarchy* sekadar berstatus hipotesis, bukan hukum (teori) karena ia menggunakan sampel yang kasuistik, bukan general. Namun, bagi Birch, ada hal berharga yang bisa diambil dari pikiran Michels dari bukunya, yang sayangnya tidak ia (Michels) elaborasi lebih lanjut. Hal tersebut adalah saran Michels bahwa persaingan elektoral dapat mendorong partai politik memoderasi kebijakan-kebijakan mereka. Birch menyatakan dalam sistem dua partai, di mana pemilih dapat diletakkan dalam kontinum ideologi dari kiri ke kanan, adalah logis apabila setiap partai melakukan *framing* kebijakan agak di tengah spektrum politik demi memperoleh basis suara yang lebih luas.

D. Teori Elit Gaetano Mosca : *The Ruling Elite*

Mosca adalah sosok yang memiliki kemapanan politik Liberal Italia. Mosca juga merupakan editor jurnal *Chamber of Deputy*, bekerja 10 tahun selaku anggota Liberal-Konservatif kamar tersebut, dan ditunjuk sebagai anggota Senat. Ia mengkritisi gagasan demokrasi partisipatoris tetapi mengagumi sistem parlementer. Berbeda dengan Pareto, ia tidak menyukai rezim Fasis yang mengambil-alih kekuasaan Italia tahun 1923 (Birch, 2001:190). Mosca juga seorang profesor dan politisi, dengan



mana aneka tulisannya banyak berisikan refleksi penuh pemikiran tentang sejarah dan politik Eropa.

Dalam *The Ruling Class* Mosca mengamati bahwa setiap masyarakat selalu terbagi ke dalam dua bagian: Minoritas yang mengendalikan pemerintahan dan Mayoritas yang diperintah oleh Minoritas (Mosca dalam Birch, 2001:190) Kondisi tersebut selalu terjadi akibat dua alasan. Pertama, minoritas dapat mengorganisir diri ketimbang mayoritas. Menurut Mosca, seperti dikutip Birch, 'seratus orang yang punya kesamaan pemahaman saat melakukan aksi bersama di sebuah konser, selalu menang atas ribuan orang yang tidak terorganisir' (Mosca dalam Birch, 2001:190). Kedua, para anggota dari minoritas yang memerintah punya atribut yang berpengaruh di mata masyarakat tempat mereka hidup.

The ruling class yang dimaksud Mosca bukan semata pemegang jabatan tinggi, tetapi juga kelas tempat pemegang jabatan tersebut berasal. Kelas dalam pikiran Mosca bukan melulu ekonomi seperti Mordecai Marx dan pengikutnya pikirkan, tetapi lebih bervariasi: Aristokrat herediter, pendeta, prajurit, pemilik tanah, penguasa keuangan, juga termasuk mereka yang menjadi Elit akibat bakat dan pendidikan.

Bagi Mosca, setiap kelas yang memerintah mengembangkan formula politik (Mosca dalam Birch, 2001:190-1). Formula politik adalah pembenaran bahwa mereka layak memerintah suatu populasi. Mosca menulis, seperti dikutip Birch, formula politik Elit Cina Mandarin adalah 'penafsir kehendak Putra Surga', Elit Islam 'penafsir kehendak Allah,' Aristokrat Perancis 'hak



ketuhanan para raja', Politisi Inggris 'kedaulatan Parlemen', Penguasa Amerika 'kehendak rakyat' (Birch, 2001:190-1).

Propaganda lalu digunakan setiap Elit untuk mempropagasi dan melestarikan formula politik agar memperoleh legitimasi. Juga, formula politik digunakan saat satu Elit berupaya melengserkan Elit lain yang kerap dilakukan dalam periode tertentu. Kendati kelas yang memerintah punya kesempatan untuk mentransfer formula politik kepada anak cucunya, tetapi sejarah membuktikan bahwa kerap terjadi pergeseran kekuasaan politik dari suatu kelas kepada kelas lain. Juga, terdapat sejumlah faktor penyebab yang membuat sebuah formula politik tidak lagi punya legitimasi.

Misalnya, formula politik Gereja digugurkan oleh formula politik dari Martin Luther tahun 1517 saat ia menempelkan tuntutannya di pintu Gereja Wuttenberg, Jerman. Saat rakyat mempertanyakan formula politik kalangan gereja yaitu 'penafsir kehendak Tuhan' maka terjadi potensi pergeseran Elit: Sejak itu kaum Lutheran dan Calvinis tidak lagi tunduk pada Vatikan. Juga, kelas aristokrat yang memerintah di Perancis hilang cengkeramannya saat rakyat Perancis tidak lagi percaya pada hak ketuhanan dari para raja pasca revolusi Perancis.

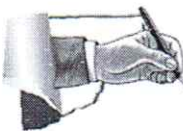
Tidak seperti Pareto, Mosca percaya atas progresivitas manusia. Bagi Mosca, kendati kemajuan peradaban kadang retrogresif, tetapi secara umum terjadi kemajuan di level peradaban. Eropa mengalami kemunduran peradaban setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi dan Timur Tengah mengalami kejumudan pasca runtuhnya Kekhalifahan Islam. Ini, bagi Mosca,



sekadar kasus-kasus khusus karena segera setelah itu terjadi indikasi ke arah kemajuan secara umum.

Saat Mosca menulis *The Ruling Class*, sejumlah negara telah mengembangkan sistem pemerintahan perwakilan. Kendati ia memiliki sejumlah keberatan, secara umum ia memberikan cukup perhatian atas sistem perwakilan politik ini (Birch, 2001:191) Ia mengkontraskan prinsip pemerintahan perwakilan demokrasi dengan yang ia maksudkan dengan demokrasi partisipatoris yang ia *breakdown* langsung dari pemikiran Rousseau. Demokrasi Rousseau bagi Mosca tidak layak diterapkan. Ini pun selaras dengan anggapan saat ini bahwa demokrasi partisipatoris (dalam pemahaman Rousseau) tidak mungkin diterapkan dalam masyarakat industri di mana wilayah negara sedemikian luas dan jumlah penduduk sedemikian besar. Demokrasi *a la* Rousseau hanya cocok untuk unit pemerintahan yang kecil atau perusahaan swasta ketimbang pemerintahan dalam skala nasional (Birch, 2001:191)

Bagaimana tepatnya pandangan Mosca atas demokrasi perwakilan? Mosca, menurut Birch, secara prinsip adalah pengagum Montesquieu. Ia menerima pandangan Montesquieu bahwa kebebasan manusia terjamin lewat pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif). Ia juga menerima pandangan Montesquieu bahwa pemerintahan perwakilan dan sistem parlementer adalah bentuk pemerintahan yang paling menjanjikan. Ia mengikuti ini kendati pemerintahan perwakilan di Italia belum terancang dengan baik. Parlemen Italia baru didirikan tahun 1871 saat Italia masih bersatu.



Namun, parlemen tersebut adalah sistem perwakilan dan pemerintahan akuntabel hanya di atas kertas. Hak pilih, saat parlemen Italia baru dibentuk, dibatasi menurut kualifikasi kepemilikan properti, yang hanya meliputi 2% orang dewasa Italia saja. Proporsi ini meningkat jadi 7% tahun 1912. Di masa Mosca sendiri, hak pilih baru meliputi 5% populasi orang dewasa saja. Ini akibat Gereja Katolik Roma memboikot pemilu sehingga penggunaan hak pilih tidak pernah lebih dari 50% dari total pemilik hak suara (yang cuma 5% itu) (Birch, 2001:192).

Hal lain yang dipetik Mosca dari pengamatannya, seperti dicatat Birch, adalah banyaknya anggota Parlemen yang melakukan korupsi serta aktivitas-aktivitas yang meragukan selama proses pemilihan. Hal-hal inilah mungkin yang membuat pemerintah Italia yang berkuasa tidak pernah kalah pemilu di seluruh masa hidup rezim Liberal Italia 1871 hingga 1923. Birch mencatat bahwa unsur pertanggungjawaban pemerintah sekadar tertulis di dalam konstitusi tetapi tidak pernah dipraktikkan di aktivitas politik sehari-hari.

Ada beberapa kritik Mosca atas kondisi politik selama rezim Liberal Italia 1871–1923. Pertama, nominasi untuk ikut pemilu dikendalikan oleh aneka minoritas kecil di setiap wilayah (mungkin mafia atau tuan tanah feodal). Kedua, mayoritas parlemen cenderung tidak akuntabel. Ketiga, secara individual anggota parlemen kerap ikut campur secara berlebihan dalam administrasi publik, administrasi pengadilan, dan pengendalian lembaga bank serta karitas publik. Bagi Mosca, seperti dicatat Birch, bentuk-bentuk perilaku ini, seiring kurang sempurnanya



sistem Pemilu, mendorong publik kecewa terhadap pemerintahan parlementer Italia di masanya (Mosca dalam Birch, 2001:192) Inilah yang mendorong Benito Mussolini memperoleh dukungan luas atas tawaran fasismenya.

Dalam masalah kesetaraan hak pilih, pandangan Mosca agak paradoks. Di satu sisi ia menghendaki jumlah pemilih yang cukup besar. Mosca berargumen bahwa besarnya jumlah pemilih (pemilih ini juga berhak untuk dipilih), maka hanya sebagian kecil pemilih tersebut yang menduduki jabatan politik. Sementara pemilih lain, yang jumlahnya besar (mayoritas pemilih) bertindak sebagai penilai obyektif terhadap setiap kandidat yang bersaing. Namun, pada sisi lain Mosca berpikir apabila hak pilih bersifat universal akan mendorong setiap pimpinan partai menjadi demagog: Bahwa untuk menyenangkan massa, mereka akan memainkan insting terkasarnya serta memunculkan segala keserakahan dan prasangka mereka untuk ditularkan pada public (Mosca dalam Birch, 2001:192-3). Konklusinya bagi Mosca, pemilih terbatas adalah mencukupi sebagai syarat liberalisme, 'bahwa mereka yang mewakili dapat bertanggung jawab terhadap yang diwakili.'

Apakah Mosca dapat disebut sebagai seorang Elitis, seorang yang menolak pemerintahan demokratis, akibat kehati-hatiannya seputar perluasan hak pilih? Jawabannya adalah ya karena di era hidupnya, pandangan Mosca ini tidaklah aneh (Mosca dalam Birch, 2001:193).

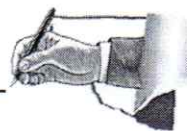
Alexis de Tocqueville sendiri bicara kemungkinan tirani mayoritas akibat hak pilih yang meluas bagi seluruh elemen



rakyat. Kekhawatiran Tocqueville ini mirip saat Aristoteles menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan mayoritas kaum miskin. Karena kaum miskin banyak, mereka akan memilih pejabat publik dari kaumnya sendiri dan akan membahayakan posisi kelas menengah-kaya. Tocqueville sendiri berasal dari kelas menengah dan ia khawatir, kendati mendukung demokrasi perwakilan, negara akan dijalankan oleh kaum miskin. Ia tidak mampu menerima kenyataan ini.

Selain Tocqueville, kekhawatiran lain diungkap oleh John Stuart Mill, bahwa ketimbang meluaskan hak pilih bagi seluruh rakyat, cukup pemilih yang berpendidikan saja diberikan hak suara ekstra. Tocqueville dan Mill adalah Elitis dalam hal pandangan mereka dalam konteks kesetaraan hak pilih. Namun, pandangan ini lumrah di era ketika sebagian besar kelas pekerja masih buta huruf dan hidup dalam kemiskinan. Namun demikian, kendati pun berpandangan Elitis, teori demokrasi dari Tocqueville dan Mill tidak dapat dikategorikan Elitisme.

Pendapat Mosca, dalam pandangan Birch, dapat dimasukkan ke dalam Proposisi A dan Proposisi B. Mosca banyak menggunakan contoh dari sejarah Eropa dan Asia. Saat Mosca menulis *The Ruling Elite* Eropa baru dalam fase awal perkembangan demokrasi dan Asia sendiri bahkan sama sekali belum tersentuh gagasan jenis pemerintahan ini. Di Eropa, feodalisme masih menggejala sehingga pemerintahan yang ada sarat kepentingan kelas pemilik tanah. Di Asia, masih terdapat pemerintahan yang dijalankan oleh kalangan agama.



Mosca yakin bahwa bahkan di pemerintahan demokratis awal Eropa, yang berkuasa adalah ruling Elite. Ia juga yakin bahwa kekuasaan pemerintahan akan terkonsentrasi di tangan kelas berkuasa yang jumlahnya kecil dan bertindak demi kepentingan mereka sendiri. Namun bagi Birch, Mosca tidaklah meyakinkan apabila disebut menelurkan teori. Ia tidak mencoba memformulasi jawaban spesifik mengenai sejauh mana minoritas yang berkuasa benar-benar terdiri atas kelas yang definitif dengan kepentingannya yang khas. Analisis Mosca mengenai Elit yang berkuasa, bagi Birch, berserakan di mana-mana sehingga pembacanya tidak menemukan kejelasan mengenai aspek ontologi maupun epistemologi Elitnya.

Argumen Birch bahwa Mosca tidak definitif atas teori Elitnya dapat ditemui dalam dua pernyataannya. Pertama, pada satu kasus Mosca menyatakan bahwa dalam sistem perwakilan 'pintu terbuka lebar bagi seluruh kelas yang diperintah untuk masuk menjadi kelas yang berkuasa' (Mosca dalam Birch, 2001:193). Lebarnya pintu yang terbuka ini memungkinkan siapa pun untuk menjadi Elit, apa pun latar belakangnya. Kedua, pada kasus lainnya Mosca menyatakan bahwa di dalam sistem perwakilan dengan hak pilih universal (atau hampir universal) 'tugas utama dari organisasi partai ke dalam mana kelas yang berkuasa terpecah adalah untuk memenangkan suara dari kelas-kelas lain yang jumlahnya lebih besar' (Mosca dalam Birch, 2001:193).

Birch melanjutkan, dari kedua pernyataan ini Mosca mengakui dua hal. Pertama, dalam sistem demokratis kelas yang memerintah akan terbuka untuk dipenetrasi oleh 'kelas yang



diperintah' dan tentu oleh seluruh warga negara lainnya. Kedua, bagi Mosca kelas yang memerintah tidak menyatu secara politik tetapi terpecah-pecah ke dalam sejumlah partai yang saling bersaing.

Birch menganggap buku Mosca tidak menunjukkan sebuah teori Elit yang bertentangan dengan teori Demokrasi moderen. Memang Mosca berpendapat bahwa di masa lampau, pemerintahan selalu berada di tangan Elit yang berupaya memenuhi kepentingan dirinya sendiri, tetapi Mosca tidak menunjukkan (bahkan mengklaim) bahwa kondisi tersebut akan terus terjadi. Bottomore menyatakan "dalam teori Mosca, seorang Elit tidak lantas memerintah lewat kekuatan dan kecurangan, tetapi mewakili, dalam satu pengertian, kepentingan dan tujuan kelompok penting dan berpengaruh di suatu masyarakat" (Bottomore dalam Birch, 2001:190). Birch setuju dengan Bottomore yang menyatakan bahwa Mosca 'siap untuk mengakui, dan bahkan menyetujui, fitur-fitur khusus dari demokrasi modern (Bottomore dalam Birch, 2001:194). Sejalan dengan Birch bahwa Mosca tidak berhasil menunjukkan teori Elit yang lengkap, John Higley juga menyatakan "jauh dari menyodorkan teori, nilai lestari karya Mosca terletak pada ajakannya untuk memfokuskan analisis politik pada dinamika Elit" (Higley, 2018:33).



E. Teori Elitis Vilfredo Pareto: Sirkulasi Elit

Pareto adalah sosiolog, tetapi manakala diperbandingkan dengan Max Weber dan Emile Durkheim, oleh Birch dianggap kurang berhasil. Kendati ambisius, Pareto mengembangkan kerangka analisis sosial yang rumit dan banyak menggunakan terminologi yang hanya ia pahami sendiri. Tidak seperti Weber dan Durkheim, menurut kritikus Birch sedikit sosiolog modern yang melirik Pareto dan 'lirikan' itu pun hanya akibat ia dianggap salah satu pendiri disiplin Sosiologi. Birch menambahkan bahwa aneka istilah yang Pareto kembangkan kini sudah terkesan *outdated* dan *irrelevant* (Birch, 2001:188).

Pareto adalah orang 'kecewa', karena ia awalnya begitu mendukung unifikasi dan Liberalisme Italia secara bersemangat, tetapi segera setelah gagal bersaing masuk menjadi anggota Parlemen, sikapnya berubah: Pareto justru berbalik mengkritik liberalisme dan demokrasi seumur hidupnya. Pareto juga eksponen pendukung rezim Mussolini saat didirikan dan beroleh penghormatan atas dukungan itu.

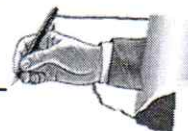
Pandangan Pareto setiap bidang dalam masyarakat punya Elitnya sendiri. Elit yang dimaksud Pareto adalah mereka yang paling berbakat dalam bidang tertentu. Untuk menjadi Elit, kata kuncinya adalah keahlian (*skill*) bukan kebajikan (*virtue*). Elit adalah mereka yang masuk ke jajaran atas setiap bidang. Sebab itu terdapat Elit pengacara, ilmuwan, penyair, bahkan pencuri. Di antara sekian macam Elit, terdapat Elit pemerintah, yang terdiri atas orang yang menunjukkan bahwa mereka adalah yang paling berbakat dalam seni politik. Pareto merujuk pada Machiavelli



dalam hal *skill* seni politik: Kelicikan seekor rubah dan kekerasan seekor singa (Birch, 2001:188). Politisi yang sukses adalah yang mereka yang mampu memadukan keahlian ini (rubah dan singa) dan melancarkan taktik.

Pandangan Pareto yang paling terkenal adalah pendapatnya mengenai sirkulasi Elit dalam bukunya *The Treatise on General Sociology*. Bagi Pareto, sejarah menunjukkan sirkulasi Elit yang terus berulang. Baik itu sirkulasi individu dari strata bawah ke strata atas di bidang yang sama ataupun sirkulasi antara elit yang memerintah dan tidak memerintah. Saat suatu Elit masuk ke dalam posisi kekuasaan politik, Elit lain harus keluar. Pareto menolak analisis kaum Marxis dan kaum Liberal bahwa sejarah peradaban bergerak progresif. Sebaliknya, Pareto hanya menjelaskan bahwa kekuasaan politik selalu jatuh ke tangan orang yang memiliki keahlian politik dan tidak ada kejelasan mengenai peradaban yang bergerak progresif. Bagi Pareto, menurut Birch, sejumlah Elit cenderung progresif, tetapi sebagian besar lainnya konservatif, dan bagi Birch, Pareto tidak memberikan dasar ilmiah atas penilaiannya terhadap dua kecenderungan Elit tersebut.

Penulis lain seperti Jan Pakulski menyatakan, Pareto membuat sketsa elite penguasa yang mencakup partai-partai lawan dan sekutu yang bergiliran masuk dan keluar dari pemerintahan. Mereka ini tanpa bertengkar tanpa henti mengenai kebijakan publik. Pareto bersikeras bahwa aneka faksi dan kelompok yang bersaing "terpaksa" membentuk jaringan patron-klien yang saling terkait. Jaringan tersebut disatukan oleh



"kesepakatan bersama" yang berasal dari "akumulasi tindakan kecil yang terus-menerus, yang masing-masingnya ditentukan oleh keuntungan sesaat" (Pakulski dalam Birch, 2001:19). Dengan demikian, bagi Pareto, satu Elit tidak lantas eksklusif dan stabil, melainkan berupaya keras untuk tetap menggenggam kekuasaan kendati untuk itu mereka harus menjalin kerjasama dengan Elit lainnya. Standar ukuran jaringan ini adalah keuntungan sesaat yang akan mereka peroleh, karena mereka khawatir apabila tidak menjalin kerjasama (bertarung sendirian) mereka akan kalah.

Birch menilai bahwa Pareto tidak menunjukkan bahwa Elit yang memerintah (baik di Italia atau negara lain) memang mendominasi publik sehubungan dengan Proposisi A, B, dan C yang telah diajukan sebelumnya. Bahwa ada implikasi Proposisi B, yaitu pemerintah memerintah demi tujuan dirinya (para Elit sendiri), tetapi Pareto tidak memberikan bukti-bukti yang sistematis. Pareto terlalu banyak memberikan ilustrasi (terutama dari sejarah Kuno), tetapi tidak terkoneksi dengan upayanya memvalidasi argumentasi yang ia ajukan bahwa memang para Elit itu memerintah untuk tujuannya sendiri. Mengenai sistem pikir Pareto ini, Birch mengutip Tom B. Bottomore, "*there are historical examples which appear at once to invalidate Pareto's generalization*" (Bottomore dalam Birch, 2001:189). Bagi Birch, apa yang Pareto sampaikan mengenai Elitisme, akan lebih baik dianggap sebagai suatu upaya melakukan elaborasi atas sebuah kerangka konseptual saat menganalisis kasus-kasus khusus,



bukan general. Karena generalitas adalah penting agar sebuah konsep dapat disebut sebagai teori.

Kendati sumbangan Pareto dalam memahami ilmu politik tidak terlalu besar, tetapi tetap diapresiasi karena Pareto berupaya menyerang gagasan umum di masa hidupnya. Bagi Birch, maksud utama Pareto adalah membuat para pembacanya menolak apa yang ia anggap sebagai ilusi liberalisme, bahwa semua orang dapat memerintah lewat lembaga demokratis, padahal hanya Elit saja yang benar-benar memerintah. Pareto menyerang ilusi kaum marxis bahwa kesetaraan dan kemerdekaan manusia bisa dicapai lewat revolusi pekerja.

Pareto menggambarkan skenario Mordecai Marx sebagai ilusi ideologis yang mengabaikan Elit dan siklus politik-ekonominya yang membuat sejarah tidak lain sebagai kuburan para Elit yang gagal (Pakulski dalam Best and Higley, 2018:17). Pareto juga menyerang pandangan Mordecai Marx yang kaku bahwa keteraturan masyarakat bersifat *bottom-up*, padahal menurut Pareto, struktur sosial-politik masyarakat bersifat *top-down* dengan Elit berada di atas dan mengarahkan massa, yang kekuatan dan kelemahannya menentukan nasib masyarakat (Pakulski dalam Best and Higley, 2018:17). Serangannya terhadap kedua gagasan *mainstream* di masanya ini (gagasan liberal dan marxis) memiliki derajat orisinalitas tersendiri sehingga karyanya layak memperoleh tempat dalam khasanah pemikiran.

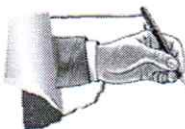


F. Media dan Hegemoni Elit Politik

Mills menyatakan bahwa terdapat "inti terdalam" elit berkuasa yang melibatkan orang-orang yang mampu pindah dari satu lembaga ke lembaga lain. Mereka memiliki pengetahuan dan kepentingan yang luas di berbagai organisasi besar serta "keahlian profesional di bidang ekonomi, politik, dan militer" (Mills, 1966:288). Perluasan kapitalisme yang cepat dan pengglobalan kekuasaan ekonomi dan militer menyatukan para pemimpin Elit berkuasa ke dalam hubungan yang rumit dengan negara-bangsa. Hubungan ini pun menciptakan kesenjangan kelas berskala global. Sosiolog Manuel Castells menulis dalam *The Rise of the Network Society* bahwa globalisasi masa kini bukan berarti bahwa "semua hal dalam ekonomi global bersifat global" (Castells,1996:101).

Ekonomi global lantas ditandai oleh kesenjangan sosial mendasar dalam "tingkat integrasi, potensi bersaing, dan porsi keuntungan dari pertumbuhan ekonomi". Castells memaparkan adanya "gerakan ganda", artinya di satu sisi, wilayah dan masyarakat yang berharga semakin terikat dalam proses peningkatan nilai dan penguasaan kekayaan global, namun di sisi lain, semua hal dan semua orang yang dianggap kurang berharga oleh proses tersebut lantas diabaikan dan dibuang (Castells,1996:108). Dampak kapitalisme global yang besar dirasakan oleh semua orang di dunia seiring semakin bergantungnya ekonomi dunia terhadap pasar keuangan, teknologi, perdagangan, dan tenaga kerja global.

Hegemoni tidak hanya menunjukkan kontrol ekonomi dan



politik, melainkan juga menunjukkan kemampuan kelas dominan dalam menampilkan cara pandangnya terhadap dunia, sehingga dengan berbagai macam cara kelas subordinat (kelas yang dikuasai Marx) menerimanya sebagai "*common sense*" atau cara pandang yang benar (Eni Maryani, 2011;53). Antonio Gramsci melihat hegemoni berdasarkan gagasan Karl Marx mengenai "kesadaran yang salah" (*false consciousness*), yaitu keadaan di mana individu menjadi tidak menyadari adanya dominasi dalam kehidupan mereka.

Gramsci menyatakan bahwa sistem sosial yang mereka dukung justru telah mengeksploitasi diri mereka sendiri, mulai dari budaya populer hingga agama (Morrison, 2012:542). Pada era modern saat ini sebenarnya proses hegemoni dari kaum kapitalis telah berjalan dengan sempurna yaitu melalui branding dan pemberitaan dalam berbagai aspek kepentingan. Di Indonesia sendiri sesungguhnya sudah merasakannya, bahkan sudah menjadi lahan *empuk* bagi kaum kapitalis untuk menyebarkan ideologinya karena jika dilihat secara kasat mata bahwa masyarakat Indonesia cenderung mengikuti gaya barat dan dengan sengaja menghilangkan budayanya, serta mudah untuk dipengaruhi oleh media.

Elit Politik memilih model komunikasi dengan menggunakan saluran media sebab komunikasi ini dianggap sangat efektif. Media akan senantiasa mempersuasi kita agar mengikuti ideologi kapitalis, media juga akan senantiasa menjaga kelompok yang berkuasa untuk tetap memegang kontrol atas masyarakat, sementara mereka yang tidak



mempunyai kuasa akan menerima apa saja yang disisakan oleh kelompok yang berkuasa. akan muncul ketika kaum kapitalis dan kontra kapitalis bertarung dalam instruments media, dalam hal ini mengenai ideologi itu sendiri dimana ketika media tidak mampu menyampaikan ideologi kapitalis kepada masyarakat awam karena setiap individu cenderung akan menolak usaha persuasi yang berusaha mengontrol perilaku dan mengancam ideologi dari individu tersebut.

Kemenangan hegemonis sebenarnya tidak pernah terjadi sebuah kesepakatan yang stabil dan siap pakai seperti yang diungkapkan Althusser (1918-1990) bahwa ideologi disampaikan oleh kelas dominan dan kelas subordinat menerima dan mengikutinya secara sukarela (*noncoercive*). Media tidak selalu dianggap kuat dalam membentuk opini publik karena disana individu yang mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menerima atau menolaknya, inilah yang disebut sebagai teori resistensi atau teori penolakan.

Hegemoni media dalam hal ini mengenai kapitalisme tidak berbicara lagi apa kebutuhan publik tetapi berbicara apa keinginan publik yang telah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan dan sasaran kapitalisme. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hegemoni media selalu mencari keuntungan terkait ekonomi pemiliknya bukan lagi sebagai penyebar informasi kepada publik.

Hegemoni tidak hanya menunjukkan kontrol ekonomi dan politik, melainkan juga menunjukkan kemampuan kelas dominan dalam menampilkan cara pandangya terhadap dunia,



sehingga dengan berbagai macam cara kelas subordinat (kelas yang dikuasai Marx) menerimanya sebagai "*common sense*" atau cara pandang yang benar (Eni Maryani, 2011;53). Antonio Gramsci melihat hegemoni berdasarkan gagasan Karl Marx mengenai "kesadaran yang salah" (*false consciousness*), yaitu keadaan di mana individu menjadi tidak menyadari adanya dominasi dalam kehidupan mereka. Dan inilah drama babak baru yang tengah berlangsung di Indonesia.

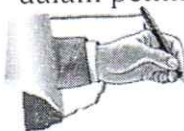


ELIT POLITIK DI INDONESIA DAN BUDAYA POLITIK

A. Perilaku Politik

Perilaku politik atau tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh warga negara adalah suatu kegiatan baik perorangan maupun kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan politik (Pemerintah). Istilah perilaku politik dalam perkembangan selanjutnya sangat terkait dengan konsep budaya politik. Kedua konsep ini tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya. Namun sejatinya kedua konsep ini berbeda jika dipahami secara lebih luas. Perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelembagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik.

Pada tataran praksis, budaya politik warga negara akan nampak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik, dalam proses rekrutmen politik partai politik atau lembaga legislatif, pada proses kampanye politik dan aktivitas menyalurkan suara politiknya dalam pemilu (eksekutif dan legislatif) maupun dalam pemilihan



kepala daerah (pilkada). Pola-pola perilaku politik yang nampak ke permukaan dan cenderung menjadi hal yang biasa secara umum, dapat mengindikasikan bahwa telah terjadi proses pelebagaan perilaku politik warga negara menjadi budaya politik. Tentu saja perilaku politik yang dikehendaki untuk menjadi budaya politik warga negara Indonesia adalah budaya politik yang bisa membangun secara konstruktif bagi pendewasaan sistem politik Indonesia. Artinya budaya politik tersebut semakin menjadi bagian yang mencirikan bahwa pendidikan politik warga negara Indonesia semakin berkualitas. Bukti adanya peningkatan kualitas budaya politik warga negara adalah dalam hal proses politik yang didalamnya setiap warga negara terlibat atau melibatkan diri. Dia berpartisipasi politik secara dewasa dalam menentukan pilihan dan keputusan politiknya.

Bagaimana fakta budaya politik yang ada dan terjadi dalam aktivitas politik masyarakat Indonesia?. Nampaknya masih jauh panggang dari api. Fenomena yang terjadi masih mengindikasikan bahwa budaya politik Indonesia belum memiliki identitas yang jelas dan ajeg. Untuk itu perlu upaya konstruktif, fokus dan terprogram dalam pembangunan budaya politik Indonesia. Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia adalah tanggung jawab segenap elemen bangsa. Ini bertujuan agar pola- pola tindakan politik warga negara dapat terarah dan terprogram menuju pada proses pencapaian kesejahteraan masyarakat.



B. Demokrasi dalam Penyelenggaraan Negara

Demokrasi sebagai pilihan sistem politik Indonesia memiliki tujuan ideal dalam hal pengakuan atas hak-hak politik warga negara. Upaya penjaminan atas kehidupan politik rakyat diatur dalam UUD 1945 dan UU Perpolitikan lainnya. Demokrasi modern yang telah berjalan dalam beberapa waktu pasca reformasi politik tahun 1998 dihadapkan pada kenyataan kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Tuntutan akan kebutuhan pemimpin negara (pusat dan daerah) yang sesuai dengan harapan masyarakat dan berjalannya proses demokratisasi dalam pemilu dan pilkada secara jujur, adil dan akuntabel adalah perlu dijawab melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*). Ini harga yang tidak bisa ditawar lagi jika Republik Indonesia ingin menjadi negara yang memiliki jati diri dalam percaturan internasional. Karena salah satu tuntutan demokrasi adalah dilaksanakannya supremasi hukum dalam setiap lini pemerintahan negara baik di Pusat maupun Daerah.

Proses berdemokrasi pada pemerintahan Negara Indonesia harus dibuktikan oleh lembaga-lembaga penjamin baik di pusat maupun daerah (Presiden, DPR, DPD maupun DPRD). Mereka harus meyakinkan rakyat bahwa demokrasi dipastikan akan berjalan dengan baik. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan harus mampu membawa kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. MPR, DPR dan DPD sebagai lembaga legislatif yang merumuskan dan menetapkan garis-garis politik negara harus



mampu membuat regulasi yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan negara. Pada sisi yang lain pola hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara harus berjalan secara baik dan seimbang. Dalam konsep demokrasi tidak dibenarkan adanya dominasi antara lembaga dalam negara. Hal yang ideal terjadi adalah bermitra dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk mewujudkan tujuan negara.

Pada tingkat penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak luput pula dari tuntutan adanya kebutuhan demokratisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Amanah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokrasi sebagai salah satu pilarnya dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Keduanya menjalankan kemitraan sebagai *co-equal partner* dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dalam batas kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Dengan demikian demokratisasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia menjadi kebutuhan yang benar dan sah berdasarkan perundang-undangan. Amanah UUD 1945 adalah



merupakan bukti konkrit bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum dan dalam berpolitik. Artinya warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara politik tanpa ada tekanan dan pemaksaan dari pihak manapun.

Korelasi antara perilaku politik, budaya politik dan demokrasi nampaknya akan terlihat pada proses politik berlangsung. Tahapan dalam pemilu dan pilkada bisa dijadikan sebagai barometer untuk melihat seberapa besar tingkat kualitas ketiga konsep tersebut dilaksanakan secara ideal oleh warga negara dalam berpolitik.

C. Budaya Politik yang Ideal

Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba (1963) sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik (negara) hendaknya memiliki orientasi yang bertujuan mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang



menjadi orientasinya.

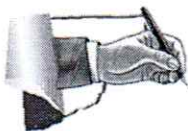
Konsep budaya politik yang didefinisikan oleh Almond dan Verba di atas sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu, dapat mengandung pemahaman yang luas. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya. Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan dari politik dalam negara. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Dalam pemahaman dan pengertian lain, budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan



para elitnya. Seperti juga di Indonesia, menurut Benedict R.O' G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok Elite dengan kelompok massa. Kedua jenis kelompok yang nyata ada dalam Negara Indonesia, dipastikan memiliki pola budaya politik yang berbeda pula.

Sementara itu, mengenai objek politik dalam pembahasan mengenai budaya politik menurut Almond dan Verba (1963) mencakup tiga komponen: *kognitif*, *afektif*, dan *evaluatif*. Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Dalam pemahaman pada komponen ini, lebih menyoroti pada seberapa besar seseorang mengetahui tentang sistem politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Komponen afektif berbicara tentang aspek perasaan seorang warga negara yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. Sehingga kondisi tersebut akan terus terbawa dalam perilaku dan cara bersikap terhadap jalannya proses dalam sistem politik. Sementara komponen evaluatif ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang. Di sini, nilai moral dan norma yang dianut dapat menentukan serta menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai moral bagi masyarakat, agar dapat menilai



dan memihak dengan benar dan arif, salah satunya melalui institusi pendidikan. Ketiga komponen dalam obyek politik yang menjadi bagian dari indikator untuk menilai seberapa besar tingkat budaya politik yang melekat dalam warga negara tersebut.

Bila dikaitkan dengan warga negara sebagai individu, maka konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran dan perasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu, dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi dalam penyelenggaraan negara, suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi dapat membentuk aspirasi, harapan, preferensi, dan prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Setiap masyarakat memiliki *common sense* yang bervariasi dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, yang berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan, partisipasi, pengawasan (*control*) sosial, serta kritik masyarakat. Pengaruh ini akan terus terbawa dalam aktivitas politik dalam pengambilan keputusan politik dalam pemilu, pilkada maupun cara berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, sosial dan pembangunan. Sehingga keluaran dari proses politik yang berlangsung dapat mencirikan tingkat budaya politik warga masyarakat tersebut.



D. Budaya Politik Indonesia

Affan Gaffar (2005) dalam teori politiknya mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga: hierarki tegar, *patronage (patron-client)*, dan *neo patrimonialistik*. Hierarki yang tegar memisahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan *self-image* yang bersifat *benevolent*. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula. Dalam pemahaman budaya politik yang bersifat hierarki tegar maka pola hubungan yang terjadi terpisahkan antara penguasa (negara) dan yang dikuasai (rakyat). Budaya politik *patronage* menurut Gaffar sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola hubungan dalam budaya politik *patronage* ini bersifat individual, yakni antara si *patron* dan si *client*, majikan dan pembantu, atasan dan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas.

Budaya politik ini menjadi salah satu penyebab maraknya praktik KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat. Berikutnya adalah budaya politik *neo-patrimonialistik* karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti



birokrasi di samping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik. Ini mengandung pemahaman bahwa negara modern dan rasional akan didukung oleh birokrasi, namun dalam praktiknya pola tradisional dengan bercirikan patrimonialistik tetap ada dalam penyelenggaraan negara. Dalam model yang ketiga ini pola KKN lebih 'ditutupi' melalui tameng kebijakan atau hukum. Sehingga dalam tataran permukaan, masyarakat umum melihat bahwa sistem politik negara berjalan baik. Padahal sejatinya ia masih sebagai budaya politik yang bercirikan *patronage*.

Nurcholish Madjid (1999) menyatakan, "Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem politik yang tidak hanya baik untuk kelompok, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia". Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan, terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan. Apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya.

Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa budaya politik masyarakat idealnya tetap sebagai pola orientasi dan sikap yang mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Pemilihan umum yang damai, pilkada yang tidak bergejolak dan semakin berkurangnya konflik politik di masyarakat, menjadi ciri bahwa budaya politik semakin membaik. Kondisi tersebut akan berdampak secara positif dalam



proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang terpilih. Namun fenomena yang sering terjadi, sebagai misal pasca pemilu 2004 atau 2009 atau pilkada sepanjang tahun 2006 sampai 2010 ini, menunjukkan bahwa setelah memenangkan pemilu atau pilkada dan berhasil menjadi pemimpin, mereka lupa diri dan bahkan mereka tidak lagi peduli pada rakyat. Bila kekuasaan masih didominasi oleh sistem feodal dan patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan oleh setiap orang akan sulit terwujud. Budaya politik yang seperti tersebut sangat tidak mendukung terhadap upaya demokratisasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia. Dengan demikian sampai saat ini kondisi budaya politik Indonesia masih jauh dari ideal. Ini merupakan permasalahan yang harus terus diupayakan menjadi semakin baik dan terbangun secara konstruktif.

E. Membangun Gerakan Budaya Politik Indonesia

Fakta yang terlihat di dalam masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parochial kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan pola orientasi dan sikap politik masyarakat bersifat patronase. Hal ini nampak dalam pola-pola perilaku masyarakat termasuk pula dalam perilaku birokrat dan Elite politik. Budaya politik masyarakat lebih didominasi parokial kaula dan pada sisi lain



diikat oleh primordialisme, maka hal ini cenderung tidak akan membangun demokrasi Indonesia yang konstruktif. Nilai-nilai yang dianut masyarakat telah membatasi dirinya untuk tidak bebas bergerak, termasuk dalam pengambilan keputusan di bidang politik baik pada aras pemerintahan pusat maupun di daerah. Benturan-benturan nilai yang terjadi relatif tidak bisa berkolaborasi secara positif dengan etika dan prinsip-prinsip demokrasi modern. Warga masyarakat telah terpolakan dalam budaya sungkan, dan *ewuh pakewuh*. Politik balas jasa adalah bagian yang telah menyatu dalam diri mereka dan membatasi diri dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Ini menjadikan tidak berkembangnya budaya politik.

Terdapat berbagai penyebab mengapa budaya politik masyarakat tidak berkembang secara konstruktif atas sistem politik demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah terjadinya krisis keteladanan dalam kaderisasi kepemimpinan dalam masyarakat sosial dan masyarakat politik. Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab muramnya wajah perpolitikan di tanah air. Buktinya adalah betapa sulitnya kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menjadi panutan bagi setiap masyarakat. Pada setiap momen dimana proses pergantian pemimpin politik (negara) maupun daerah, melalui pemilu maupun pilkada, maka sudah dipastikan tidak ada sosok yang mampu menjadi panutan masyarakat. Rendahnya keteladanan pemimpin bagi rakyatnya mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat. Kondisi seperti ini berimbas pada hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri. Jika dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan



sudah tidak dimilikinya legitimasi maka sudah dipastikan akan terjadinya pola hubungan disharmonis antara masyarakat warga negara dan pemerintah atau wakil politik yang terpilih. Hanya pemerintah atau wakil lembaga politik yang memiliki komitmen dan berjiwa teladanlah yang dipastikan akan membawa pada harmonisnya penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk membangun keteladanan sebagai wujud dari gerakan budaya politik Indonesia, maka diperlukan sikap dari para Elite politik, pejabat negara dan tokoh-tokoh yang duduk pada lembaga tinggi maupun lembaga publik di tingkat daerah. Proses membangun kualitas keteladanan para pelaku politik tersebut tidak bisa berlangsung secara instan, karena harus terpolakan dan tersistematisasikan secara baik. Hal tersebut jelas memerlukan upaya serius dari berbagai komponen bangsa dan para pengambil keputusan.

Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia bisa dilakukan melalui program pendidikan, baik jalur pendidikan formal maupun non formal. Sebagai alasannya bahwa pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Artinya penanaman nilai-nilai positif bagi masyarakat bisa dimulai dari pendidikan ini. Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Tentu saja nilai-nilai, norma, etika dan cara bersikap dalam berpolitik merupakan bagian yang diberikan dalam program pendidikan.

Dalam hal pendidikan politik, maka peranan partai politik



sangatlah penting. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kelompok masyarakat politik dalam ideologi maupun nilai-nilai yang dianut, harus mampu menjadikan dirinya sebagai *change agent* bagi perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat kadernya menjadi semakin baik. Hal tersebut akan bisa dicapai manakala partai politik memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Kelompok masyarakat dalam organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) dan LSM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas warga masyarakat juga memiliki peran penting dalam membangun gerakan budaya politik Indonesia. Kelompok ini memiliki predikat sebagai masyarakat yang melek politik. Di dalamnya terdiri dari individu-individu yang mengerti dan memahami sistem politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Idealnya Ormas dan LSM ini mengambil andil dalam proses gerakan membangun budaya politik. Peran serta yang dapat dilakukan adalah melalui pendampingan, advokasi dan peningkatan kapabilitas masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan lainnya.

Terdapat tiga kategori jenis orientasi yang sebaiknya dikonstruksikan oleh Elite politik, pejabat publik, ormas, LSM dan pihak-pihak terkait kepada warga masyarakat. Jenis orientasi yang dimaksud yaitu: orientasi terhadap struktur politik pemerintahan, orientasi terhadap bagian-bagian yang ada di dalam sistem politik dan orientasi terhadap aktivitas politiknya. Orientasi masyarakat terhadap politik tersebut diupayakan agar mampu berkontribusi terhadap pembangunan budaya politik



Indonesia yang semakin baik.

Membangun gerakan budaya politik yang konstruktif seperti diuraikan di atas, hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena ini terkait dengan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan politik negara. Tujuannya ke depan agar dalam setiap perhelatan politik, maupun proses dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main dan UU yang berlaku. Masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik dan tingkat konflik politik semakin berkurang, sehingga stabilitas politik negara akan tetap terjaga dalam koridor hukum yang menjadi landasannya.



PENGGUNAAN SIMBOL – SIMBOL DALAM PROSES KOMUNIKASI ELIT POLITIK

A. Hakikat Manusia dan Simbol-Simbol Kekuasaan.

Manusia secara kodrat, adalah pengguna dan pembentuk simbol-simbol komunikasi, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Hal ini refleksi dari kodrat manusia sebagai makhluk yang hidup dengan manusia lain, atau hidup bermasyarakat (*civil society*) yang disebut dalam bahasa Jerman "*Buergerliche Gesellschaft*". Manusia mempunyai struktur ganda yaitu **Tahu** dan **Mau**. Untuk menata kedua simbol (tahu dan mau) ini, dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penataan normatif.
2. Penataan efektif (Magnis, 1987;19).

Kedua cara ini, merupakan pedoman sikap perilaku manusia agar tidak ingkar dari hakikat hidup dalam alam semesta, yaitu simbol-simbol kebenaran dan keadilan yang hakiki.

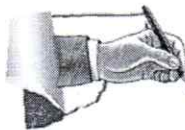
Pertama, penataan normatif yang merupakan penataan dari segi hukum, dengan mengakomodasi simbol-simbol hukum. Hukum terdiri dari kaidah- kaidah atau norma-norma yang membolehkan dan melarang. Namun, simbol- simbol yang



dibentuk oleh penataan ini, tidak memberi jaminan terhadap perubahan sikap perilaku manusia. Cara penataan yang dapat mengubah perilaku manusia hanyalah dengan cara penataan yang kedua, yaitu penataan efektif. Penataan efektif dilakukan oleh negara yang diberi atribut kekuasaan dan merupakan penataan "*de facto*" yang secara realitas menentukan kelakuan masyarakat.

Negara sebagai kontur, mewadahi berbagai ragam simbol-simbol komunikasi, dan merupakan institusi kemasyarakatan tertinggi dari institusi-institusi kemasyarakatan lainnya seperti institusi kekerabatan (*kinship institution*), institusi kebudayaan (*cultural institution*) dan masih banyak lagi institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang konsep negara sebagai institusi kemasyarakatan dapat Anda baca dalam buku "Pengantar Ilmu Antropologi" karangan Koentjaraningrat. Negara pada hakikatnya bertugas untuk melindungi warga negaranya, dan mewujudkan simbol-simbol kesejahteraan lahir dan batin (Koentjaraningrat, 1994:10). Seringkali dijumpai terminologi warga negara, rakyat dan masyarakat, ketiganya sering digunakan secara bergantian. Warga negara sebagai terminologi hukum, rakyat adalah terminologi politik, dan masyarakat sebagai terminologi sosiologi.

Individu sebagai dimensi kesosialan, diharapkan memiliki tiga diametral yaitu: Pertama, penghayatan spontan individual, kedua, berhadapan dengan lembaga-lembaga, ketiga, melalui pengertian-pengertian simbolis.



Dalam proses komunikasi politik, individu-individu tidak lagi berada dalam tindakan spontan individual, namun kegiatan komunikasi individu berada dalam pola-pola tindakan bersama, yaitu dalam lembaga-lembaga. Lembaga yang paling tinggi tingkat frekuensi penggunaan simbol-simbol komunikasi, adalah lembaga otoritatif atau lembaga kekuasaan.

Secara filosofis pengelola simbol harus diakui keabsahannya melalui tiga sifat pengakuan. Pertama, legalitas normatif yaitu pengakuan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan produk-produk kebijakan komunikasi yang harus dapat dilaksanakan oleh publik (komunikan), karena merasa bahwa kebijakan tersebut mengakomodasikan kepentingan-kepentingan publik. Kedua, legitimasi demokratis yang terkait dengan pengisian struktur kekuasaan yang diselenggarakan secara demokratis, seperti melalui pemilihan umum dengan menggunakan simbol-simbol artikulatif kepentingan. Ketiga, legitimasi moral yaitu pengakuan berdasar prinsip-prinsip moral. Moral selalu terkait dengan perspektif simbol baik atau buruk dan tanggung jawab.

Dalam proses komunikasi politik moral melandasi sikap perilaku para pengelola sumber-sumber komunikasi di dalam upaya mencapai tujuan komunikasi, yaitu terpenuhinya tujuan tersebut secara komplementer (tidak ada yang dirugikan).



B. Simbolisme Komunikasi Politik

Einstein dalam teori relativisme membicarakan pula tentang simbol, bahwa kehidupan manusia pada dasarnya sebagai pengguna simbol. Hidup manusia dipengaruhi oleh simbol-simbol atau lambang-lambang. Simbol pada hakikatnya mewakili realita atau mewakili abstraksi- abstraksi yang tidak dapat dipersonifikasikan dalam alam pikiran dan perasaan.

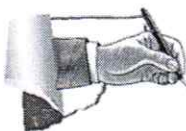
Simbol adalah mediator antara individu, kelompok, etnis kultur, bangsa dengan yang lainnya. Atau dapat pula dinyatakan bahwa simbol menghubungkan antara *micro cosmos* dengan *macro cosmos*. Dengan simbol tersebut, maka hambatan-hambatan *geo cosmos* dapat diatasi, bahkan lebih dari itu, peristiwa di berbagai belahan bumi dapat diketahui dan dapat dipantau. Lahirnya simbol-simbol tersebut pada hakikatnya sebagai produk kontrak simbol antar etnis budaya.

Sejarah mencatat bahwa simbol lahir mengikuti kehadiran umat manusia. Semakin manusia maju dan berkembang, semakin kompleks pula simbol yang digunakan. Manusia mulai menggunakan simbol-simbol komunikasi dalam pola-pola kehidupan bersama.

Manusia yang tergabung dalam pola kehidupan, mempunyai simbol- simbol khusus atau tertentu, yang hanya dipahami oleh kelompok bersangkutan.

Simbol dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal yaitu:

1. Bahasa, baik lisan maupun tulisan;
2. Gambar-gambar;



3. Isyarat-isyarat;
4. Gerak-gerak dan raut muka.

Sedangkan, simbol dalam komunikasi politik adalah simbol-simbol kekuasaan dalam struktur kekuasaan dan dalam infrastruktur kekuasaan. Perbedaan simbol sebagai faktor penyebab berlangsungnya tukar menukar simbol tidak lagi berlingkar pada skala kecil, namun telah melebar kepada skala yang lebih besar dan lebih luas.

Secara krusial simbol-simbol tersebut, telah berkembang ke dalam norma-norma tertentu yang diwarnai oleh konsep-konsep pemikiran berbeda misalnya ideologi, yaitu pemikiran yang didasari pada nilai-nilai (*value*) tertentu. Simbol-simbol komunikasi yang berada dalam lingkup ideologi telah memiliki karakter pembeda, artinya telah memiliki kecenderungan atau a priori. Sebagai contoh, persepsi-persepsi yang disebut partai politik atau dalam terminologi komunikasi disebut *monomorphic* dan partai itu sendiri disebut *homophily*.

Pada tahapan ini, individu yang mengikatkan dirinya pada partai dapat dikategorikan ke dalam empat tipe. Pertama, individu yang mengikat diri pada partai adalah untuk mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kepentingan yang hendak dicapai.

Partai dijadikan alat atau mekanisme untuk mempercepat tercapainya kepentingan tersebut. Simbol-simbol komunikasi diciptakan untuk mendapat dukungan dan kepercayaan orang lain.



Kedua, dengan memasuki atau menjadi anggota partai akan merasa aman dari tindakan dan sikap perilaku orang lain pada dirinya, atau partai sebagai instrumen untuk meningkatkan status sosial. Ketiga, individu yang betul-betul ingin memperbaiki situasi untuk kepentingan bersama, sehingga orientasi berpikirnya lebih pada kepentingan masyarakat, bahkan untuk kepentingan nusa dan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, individu mulai memasuki simbol-simbol komunikasi yang menjadi isu sentral dan isu perbaikan yang mendasar. Berbeda dengan kedua tipe tersebut di atas, maka pada tahapan ketiga ini, adalah untuk mencapai harapan individu dan individu mulai mendekatkan diri pada sumber-sumber kekuasaan.

Dari ketiga macam tipe tersebut di atas, maka tipe keempat memberi isyarat bahwa individu masuk dalam partai hanya terbawa arus dan tidak menghayati maksud tujuan partai. Komunikasi politik tidak diinterpretasikan ke dalam kepentingan mereka.

Hal ini mengandung makna setiap kepentingan tidak mungkin dapat terpenuhi apabila tidak ditransformasikan melalui lambing - lambang komunikasi. Karena secara filosofis, lambang-lambang komunikasi selalu menyertai kehidupan manusia baik secara individu, kelompok, masyarakat maupun secara organisasi atau partai politik.

Oleh sebab itu, simbol-simbol yang muncul pada komunikasi politik sangat beragam, bahkan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat negara. Hakikat simbol bagi suatu kelompok atau suatu organisasi merupakan personifikasi



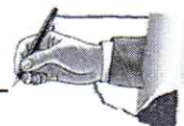
dari perilaku organisasi. Bahkan mewakili ungkapan pikiran, pendapat dan perasaan. Sebagaimana halnya manusia, organisasi pada hakikatnya adalah komunitas manusia, sehingga perilaku organisasi adalah cerminan perilaku manusia.

Kehadiran simbol komunikasi dalam kehidupan manusia, sesungguhnya untuk memelihara dan mempererat serta memperluas hubungan, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Karena itu hakikat kehidupan manusia dalam mempertahankan kehidupannya adalah produk pertukaran simbol.

Tinjauan filosofis tentang simbol memberi makna sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Bahkan seorang filsuf bernama Einstein berpendapat bahwa kehidupan empiris manusia terdiri dari simbol-simbol yang mewakili kenyataan empiris dan khayal yang sulit untuk diekspresikan.

Demikian pentingnya simbol-simbol tersebut dalam proses komunikasi politik, ataupun proses komunikasi pada umumnya, maka simbol-simbol yang digunakan harus merupakan produk "kesepakatan bersama" (*symbol contract*) yang akan memberi makna sebagai meaningful symbol atau simbol yang berarti. Makna simbol yang berarti adalah simbol yang dapat dipahami bersama, baik oleh komunikator maupun oleh komunikan.

Demikian halnya dalam kehidupan kenegaraan, maka simbol-simbol yang digunakan harus dipahami oleh elit struktur kekuasaan, elit masyarakat dan warga negara pada umumnya, atau simbol-simbol yang digunakan dalam lingkup suatu sistem.



Simbol komunikasi politik yang digunakan dalam sub-sistem suprastruktur adalah simbol-simbol yang digunakan dalam struktur kekuasaan pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pada sub-sistem infrastruktur yaitu simbol-simbol yang tersebar secara bervariasi.

Tinjauan filosofis terhadap simbol-simbol komunikasi politik lebih berorientasi pada partai politik, dengan tidak mengabaikan sub-unit system yang lainnya seperti: figur politik, kelompok penekan, kelompok kepentingan dan alat komunikasi politik. Simbol-simbol komunikasi yang berkembang dalam partai politik berdampak tajam terhadap simbol-simbol yang berkembang pada struktur kekuasaan bahkan antara keduanya bersifat berkaitan atau saling berpengaruh.

Kondisi infrastruktur menunjukkan karakteristik suatu sistem politik. Pada negara penganut ajaran demokrasi, kehidupan infrastruktur sebagai faktor yang sangat menentukan kehidupan negara, karena struktur kekuasaan diisi oleh elemen infrastruktur melalui mekanis pemilihan umum.

Simbol-simbol politik pada partai politik merupakan produk kontrak simbol antar anggota partai untuk:

1. Menyamakan langkah partai dalam mencapai tujuan partai.
2. Menyamakan persepsi tentang kelangsungan hidup dan eksistensi partai.
3. Menentukan simbol-simbol yang efektif bagi perjuangan partai.
4. Komitmen moral terhadap sistem nilai yang berlaku dalam partai.



Oleh sebab itu maka setiap partai memiliki unsur pembeda terhadap partai lain, karena perbedaan inilah maka perlu adanya konsensus yang memacu terwujudnya kolegialitas dan tingkat toleransi.

Sedangkan simbol-simbol dalam kehidupan negara hakikatnya adalah untuk:

1. Mewujudkan karakter bangsa yang memiliki kepribadian (*personality*) sebagai suatu bangsa (*nation*).
2. Mewujudkan loyalitas warga negara terhadap negaranya.
3. Meningkatkan kualitas toleransi terhadap ego kelompok (partai).
4. Meminimalkan kondisi konflik yang merugikan negara.

Dari ungkapan di atas, dipahami bahwa kehadiran simbol-simbol komunikasi tidak sekedar pelengkap, namun sebagai suatu unsur yang sangat menentukan kehidupan negara.

C. Media Komunikasi Politik

Alat komunikasi politik dengan terminologi media komunikasi politik (*political communication tools*) dapat berupa media cetak, media elektronik dan cara-cara yang bersifat konvensional. Alat komunikasi politik, pada hakikatnya, adalah untuk memperluas nuansa pandang dan berpikir yang tidak terpasung kebakuan-kebakuan egosentris yang dapat memperlebar perbedaan.



Fungsi yang paling dominan pada alat komunikasi politik adalah sebagai:

1. Alat untuk menyebarkan statement politik;
2. Alat informasi dan pendidikan politik;
3. Alat propaganda politik;
4. Alat konsolidasi dan konsensus nasional;
5. Alat sosialisasi politik.

Hakikat keberadaan media sangat memberi makna dominan bagi kehidupan manusia. Selain kehadirannya untuk memberi rujukan kepada masyarakat tentang hal-hal yang belum diketahui atau tidak diketahui, media memberi manfaat pula untuk meminimalis pendapat yang berbeda dan untuk memberikan perbandingan tentang nilai yang sangat berguna bagi masyarakat bersangkutan. Selain itu, media massa membuka cakrawala pandang peristiwa-peristiwa yang berada di ruang waktu di berbagai belahan dunia.

Dalam menggunakan media ini tidak dilihat dari benda matinya saja, namun dilihat pula dari sisi manfaat dan tujuan produksi media tersebut, sehingga dengan media massa dapat menembus ruang dan waktu yang sulit ditembus secara personal. Faktor geografis tidak lagi menjadi hambatan utama yang selama ini menjadi masalah bagi negara-negara yang tertinggal di bidang teknologi.



D. Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Politik

Fenomena komunikasi politik dapat dilihat dari pandangan teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya pada diri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan (Nugroho, 2015:4). Sebab dalam proses pemilihan pemimpin (mulai dari presiden sampai di level paling rendah) pertukaran pesan dilakukan melalui berbagai atribut atau simbol-simbol dari masing-masing partai politik maupun aktor politik. Misalnya, pada saat kampanye simbol-simbol, bendera partai banyak menggunakan gambar/foto dari para aktor politik. Penggunaan simbol-simbol tersebut menurut Eep Saefullah Fattah dalam Lely Arrianie (2010:28) adalah ingin terlihat menonjol. Di mana penonjolan semacam ini ternyata sangat bersifat simbolik sehingga teori interaksi simbolik sebagai pendekatan yang bermanfaat untuk menggali berbagai pengertian tentang kehidupan kelompok manusia dengan fokus sentralnya tentang interaksi dan komunikasi politik yang dilakukan untuk mempertukarkan pesan-pesan politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Rakyat (Legislatif).

Teori interaksi simbolik pada dasarnya berada di bawah payung perspektif yang lebih besar, yaitu perspektif fenomenologis, di mana tokoh utamanya adalah George



Herbert Mead. Dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self and Society*, Mead (Ritzer, 2012:272) mengungkapkan bahwa keseluruhan sosial mendahului pemikiran individu baik secara logika maupun secara temporer. Individu yang berpikir dan sadar diri adalah mustahil secara logika tanpa di dahului adanya kelompok sosial. Menurut Mead kelompok sosial muncul lebih dulu, dan kelompok sosial menghasilkan perkembangan keadaan mental kesadaran diri.

Esensi dasar dari teori Mead (Mulyana, 2001:68-73) adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Jay G. Blumler (1979) mengintegrasikan gagasan- gagasan interaksi simbolik dengan John Dewey, William I. Thomas dan Charles H. Cooley. Gagasan mereka tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol. Hal ini didasarkan pada tiga asumsi, yaitu:

Pertama, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka tidak bersifat mekanistik, tidak pula bergantung bagaimana eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, individu adalah yang dipandang aktif menentukan lingkungan mereka sendiri (Gayriel, 1997:375-



380).

Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa, dan gagasan itu bersifat arbitrer (sembarang). Artinya, logis antara nama atau simbol dengan obyek yang dirujuknya meskipun kita terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia.

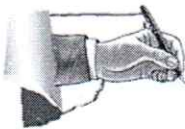
Ketiga, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya. Manusia membayangkan atau merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu mengantisipasi reaksi orang lain, mencari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan peran tertutup (*covert role-taking*) itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Karena itu, kaum interaksionis simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan



tindakan terbuka, menganggap tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tindakan tertutup.

Ketiga asumsi tersebut di atas, disimpulkan Blumler dalam tiga premis, yaitu: (a) manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu, (b) makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain, dan (c) makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung. Seperti yang ditegaskan Blumler, maka perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subyek (Kuswarno, 2009:113).

Persepektif interaksi simbolik menurut Howard Becker dalam Roscoe C. Hinkle (1961:155-180) menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Defenisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, obyek dan bahkan diri sendiri menurut Douglas (1973:216) ditentukan oleh perilaku mereka sendiri. Karena itu manusia bertindak hanya berdasarkan defenisi atau penafsiran mereka atas obyek-obyek di sekeliling mereka, dan tidak digolongkan sebagai kebutuhan dan dorongan impuls (hati), tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Bagi Blumler (Becker, 1990:6) proses sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menengakkan aturan-aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakan kehidupan kelompok. Dalam konteks ini, makna



dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan peranannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial (Mulyana, 2001:70).

Berkaitan dengan teori interaksi simbolik ini, maka George Ritzer dalam Mulyana (2001:73) meringkas teori ini kedalam prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan berpikir.
- b. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
- c. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
- d. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (*action*) dan interaksi yang khas manusia.
- e. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
- f. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
- g. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini



membentuk kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan ketiga premis dan ringkasan teori di atas, menurut Engkus Kuswarno (2009:114) terdapat esensi bahwa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna merupakan suatu aktivitas yang khas di antara manusia. Selain itu seseorang akan menjadi manusiawi hanya melalui interaksi dengan sesamanya, di mana interaksi yang terjadi antara manusia akan membentuk masyarakat. Karena manusia secara aktif membentuk perilakunya sendiri. Kesadaran dan pikiran melibatkan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.

Berkaitan dengan kemampuan manusia untuk dapat merespon simbol-simbol di antara mereka berinteraksi, menurut Mead (Kuswarno, 2009:114) membawa penjelasan interaksi simbolik kepada konsep tentang diri (*self*). Apa yang menjadi penekanan dalam teori ini sangat relevan dengan kajian buku ini tentang komunikasi Elit politik dan penggunaan simbol-simbol komunikasi. Karena konsep Mead tentang diri yang lebih menekankan pada konsep "pengambilan peran orang lain" (*taking the role of the other*), atau penjabaran "diri sosial" (*social self*) adalah dilakukan melalui makna yang dikonstruksikan secara sosial.



MODEL KOMUNIKASI ELIT POLITIK DI INDONESIA

A. Model Komunikasi Transaksional

Transformasi sistem sentralistik menjadi disentralistik adalah hasil perjuangan reformasi yang berdampak sangat besar bagi perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Ruang demokrasi lokal kemudian menjadi menarik untuk diikuti karena dinamika kontestasi politiknya semakin hidup melalui jalur partai politik tetapi juga menciptakan model kepemimpinan transaksional. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Gumelar dkk dapat dijadikan sebagai titik tumpu untuk menjelaskan mode komunikasi Elit politik. Penelitian Gumelar dkk (2021) memperlihatkan bahwa komunikasi politik memiliki korelasi yang cukup tinggi terhadap transaksional politik.

Pemilihan langsung dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berpolitik bagi setiap warganya saat ini masih menyisakan banyak persoalan dari perspektif kejujurannya. Kekuasaan menjadi pemimpin daerah tidak terlepas dari adanya sifat-sifat transaksional yang membutuhkan pada kekuatan modal sehingga terjadi suatu korelasi yang sangat jelas dimana kekuatan modal menjadikan indikator kuat dalam meraih



dukungan khususnya untuk mendapatkan kursi dari partai yang mengusung.

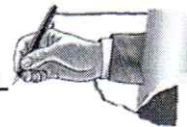
Dalam hal tersebut kekuasaan dan uang seakan menjadi sebuah kovalen yang juga memiliki fungsi sosial dimana menjadi fungsi acuan rata-rata bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, masyarakat hingga organisasinya (Ahmad, 2015). Alasan kemudian dilakukan pemilihan secara langsung yaitu ; 1) Agar konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana esensinya rakyat berhak menentukan siapa yang cocok menjadi pemimpinnya terutama dalam menentukan pola dan arah kebijakan yang mereka ambil demi terciptanya masyarakat yang sejahtera; 2) Sebagai upaya dalam rangka menciptakan struktur kekuasaan yang berimbang antara eksekutif dan legislatif (Surbakti, 2007). Akan tetapi pada prakteknya proses demokrasi ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam pelaksanaannya, proses pemilukada yang ada saat ini disinyalir sangat kental karena adanya proses transaksi dan berbiaya tinggi sehingga menghasilkan asumsi antara calon tersebut dengan masyarakatnya melakukan praktik jual beli suara dalam proses pemilukada tersebut (Kumorotomo, 2009).

Dalam hal ini satu suara dari masyarakat dapat dijadikan sebagai sebuah komoditas yang sangat penting dalam pemilukada dimana memiliki nilai jual bagi para calon yang bertarung, dan jauh sebelumnya suara dari partai pengusung untuk calon yang akan bertarung sangat rentan terhadap



bagaimana si calon tersebut memainkan kekuatan modalnya bagi partai yang mengusungnya.

Kompleksitas permasalahan juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana dalam pasal 40 (1) disebutkan bahwasanya partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Hal ini menjadi sangatlah sulit yang untuk sebuah partai mengusung calonnya sendiri sehingga dengan demikian harus tercipta sebuah koalisi pragmatis demi kepentingan sesaat untuk menggolkan pasangan tersebut. Selain dari itu calon yang diusung tentunya harus dapat mengkompromikan atas kepentingan-kepentingan dari partai pengusung tersebut, sehingga kontrak politik terasumsikan sebagai sebuah transaksional kepentingan jangka panjang. Dengan demikian demokrasi tidak seutuhnya bebas, dikarenakan memiliki ketergantungan yang besar pada kekuatan partai politik sebagai kendaraan politik (Sulaiman, 2013). Keadaan ini bukan saja hanya di Indonesia akan tetapi juga telah merambah pada seluruh dunia yang mengatasnamakan demokrasi.



Adanya transaksional dalam perjuangan menentukan sosok pemimpin, yang memiliki kepentingan yang sangat tinggi tentunya mencederai pada substansi demokrasi itu sendiri. Sifat transaksi tersebut yang merujuk pada kekuatan modal yang kemudian terbungkus pada politik uang tentunya menyiratkan bagaimana proses pembentukan kepemimpinan yang seyogyanya dalam demokrasi dengan nilai kejujuran dan etika ini sangat tidak diharapkan, permainan *money politics* tidak dapat dihindari (Pratikno, 2007). Sangat berat tentunya hasil dari praktik ini menghasilkan sosok pemimpin yang mampu membuat terobosan dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kepentingan rakyat yang seringkali bertentangan karena adanya kepentingan bersama yang telah disetujui dalam sebuah kesadaran berkelompok ataupun berkoalisi (Ahmad, 2015). Fenomena ini yang akhirnya sulit untuk mewujudkan sebuah harapan pesta demokrasi yang bebas dan adil untuk dilaksanakan, karena pada tahapan awal penentuan calon pemimpin yang diusung banyak disinyalir beririsan dengan praktik *money politic*. Pada akhirnya sebagai kepala daerah yang mengemban dua tugas berat yaitu sebagai pejabat publik dan juga sebagai pejabat politik, tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, karena tersandera pada sebuah proses konsensus dari partai pengusung termasuk pada kelompok atau Elit di luar partai yang memiliki kontribusi atau sumber daya yang dapat meloloskan calon tersebut menjadi kandidat calon hingga pemenang pemilihan kepala daerah.



Pergerakan para Elit dalam membangun komunikasi politik membangun sebuah paradigma dan keputusan yang baik secara sadar atau tidak sadar masyarakat harus mau menerimanya. Praktik politik yang berlakusaat ini, dan hampir berkembang di seluruh wilayah Indonesia memberikan sebuah gambaran jelas pada kita bagaimana transaksi politik tersebut terjalin.

Komunikasi politik merupakan hasil kombinasi antara pengetahuan dan seni dalam praktiknya (Kenterelidou, 2005). Pendekatan komunikasi yang sesuai pada penerapan komunikasi politik adalah model komunikasi Lasswell yang bersifat linear (Lasswell, 1948), terdiri dari *Who Says What, To Whom, In Which Channel, and What Effect*. Laswell memandang bahwa efek atau keberhasilan dari sebuah komunikasi sangat tergantung pada bagaimana proses komunikasi itu dilakukan. Pengembangan pada model Lasswel ini, ternyata bukan saja dalam komunikasi yang sederhana atau linear semata, akan tetapi model ini dapat digunakan pada tataran komunikasi politik, karena pada tataran ini akan berusaha secara serius pada arah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan (Nimmo, 1978). Tujuan yang menjadi kesepakatan bersama, dalam kenyataannya untuk meraih tujuan tersebut memiliki biaya yang sangat besar. Tujuan dalam komunikasi politik itu sendiri bukan dalam konteks jangka pendek semata, akan tetapi dalam proses jangka panjang. Kekuasaan politik akan selalu dipelihara dengan baik, karena bagaimanapun berada dan mengendalikan kekuasaan tentunya memberikan kenyamanan tersendiri dan bagi orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan tersebut.



Komunikasi politik dibangun dalam bentuk pragmatis, oleh sebab itu bahasan dalam komunikasi politik selalu memunculkan pada karakteristik dan identitas keilmuan itu sendiri yang bersifat ilmu murni (*pure science*) yang berarti ideal yang masuk dalam lingkup *das Sollen* dan *das Sein*. Oleh sebab itu keterkaitan pada setiap elemen pada model Laswell sangatlah penting, yaitu: a) *Who Says What* (Komunikator Politik Berbicara Pesan) merupakan bagian penting yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi, dalam konteks ini jika kemudian kita gambarkan komunikator berada pada struktur kekuasaan, yang sekiranya dapat mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi serta bagaimana mereka menggiring pada suatu wilayah ataupun cakupan yang sesuai dengan kepentingannya; b) *To Whom* (Komunikan), Perilaku pemilih dalam menentukan pasangan mana yang dipilih saat ini dengan kedewasaan berpikir dan kebebasan memilih dapat dikategorikan sebagai pemilih yang cerdas. Masyarakat tidak akan langsung percaya terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator politik, akan tetapi dilakukan analisis terhadap pesan yang ada; c) *In Which Channel* (Media), apa yang kemudian digunakan dalam proses penyampaian pesan ini sangat penting; d) *What Effect* (Efek), yang kemudian dihasilkan dari adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Jika kemudian kita sederhanakan, bahwasanya efek akan bernilai positif jika para pemilih sesuai dan cocok untuk memilih pasangan yang bertarung.



Dari berbagai kajian ditemukan model komunikasi Elit politik sangat agresif menjelang perhelatan pesta politik berlangsung. Hegemoni Elit dalam media menjadi bagian penting agenda *setting* untuk mencapai tujuan politik. Hegemoni media memiliki tujuan agar masyarakat mendapatkan sisi yang positif terhadap elit politik yang tengah bertarung dalam perhelatan demokrasi. Apakah dalam proses pemilihan legislatif ataupun eksekutif (kepala daerah dan presiden). Model komunikasi Elit politik semakin jor-joran dalam berbagai media, baik media online, cetak maupun media verbal.

B. Model Komunikasi Kegaduhan.

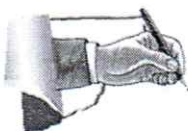
Anang Sujoko (2018) menganalisis di saat jeda perhelatan demokrasi, model komunikasi Elit politik masih terus berlangsung dalam pertempuran hegemoni media. **Perseteruan Elit** politik antar kubu yang bersaing dalam ajang pesta demokrasi di Indonesia saat jeda pesta demokrasi bukanlah suatu yang berhenti dengan sendirinya, nyatanya menyusut Anang Sujoko kian meruncing. Tidak tanggung-tanggung, perseteruan tersebut menampilkan tokoh-tokoh Elite politik dan bahkan pejabat negara ikut hanyut dalam perang komunikasi. Perseteruan itu dilihat oleh Anang Sujoko bagai pertempuran di media untuk menunjukkan hegemoni mereka masing-masing. Anang Sujoko menyebutkan komunikasi politik kaum Elit sebagai *role model* komunikasi politik kegaduhan (Sujoko, 2018).



Sebenarnya perang komunikasi politik memperebutkan hegemoni tidak hanya terjadi di kalangan elite politik saja, melainkan terus mengalir ke masyarakat umum seolah terbawa arus teknologi komunikasi yang semakin egaliter, media baru. Kehadiran media baru dalam ajang Pilpres, Pileg, Pilkada dan penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah menelanjangi jati diri pejabat negara, tokoh elite politik dan rakyat. Kemudahan akses ke media serta fasilitas *User Generated Content*, telah memberi *power* ke individu-individu untuk menjalankan peran seolah seperti industri media massa yakni memproduksi dan sekaligus menyebarkan “berita” secara masif ke khalayak.

Pernyataan-pernyataan pejabat negara, tokoh masyarakat, Elite politik atau aktivis partai politik di media massa seolah menjadi pemantik debat antar anggota masyarakat atau simpatisan pendukung. Ranah publik bukan lagi didominasi industri media semata. Inilah model komunikasi politik Elit yang tengah tersaji di berbagai media secara vulgar dan saling ancam mempertontonkan kekuatan dan hegemoni mereka masing-masing.

Jika pejabat negara dan kaum Elite politik sudah berperilaku demikian, maka rakyat bisa berperilaku lebih dari apa yang mereka lakukan, dan bahkan dalam beberapa media sosial netizen berperilaku lebih vulgar dan cenderung menjatuhkan martabat dari kaum Elite politik tersebut. Artinya, *Role Model* dalam sebuah literasi politik seharusnya bisa diperankan oleh tokoh politik, pejabat negara dan elite politik sehingga



masyarakat bisa belajar bagaimana berkomunikasi politik di ranah publik.

Demokrasi yang mengedapankan popularitas ini memang tidak bisa melepaskan peran pejabat negara, Elite politik, tokoh masyarakat dan media dalam pembelajaran masyarakat dalam berkomunikasi dan berpolitik. Namun jika para Elite tersebut justru membuat kegaduhan dan melanggar norma-norma ketimuran dalam bersikap dan berperilaku, maka publik akan mendefinisikan ini adalah model “kita” (Sujoko, 2018).

C. Model Komunikasi Virtual.

Media massa dan politik tidak bisa dipisahkan karena media sebagai saluran komunikasi politik yang sangat efektif. Media massa memainkan peran yang sangat penting dalam proses menyampaikan pesan kepada khalayak luas menjadikan media sebagai objek, media penyiaran merupakan organisasi yang menyebarkan informasi yang berupa produk budaya atau pesan yang dapat mempengaruhi dan mencerminkan budaya dalam masyarakat, seperti halnya aspek politik dan ekonomi.

Diera digital media menjadi salah satu penyiaran yang cukup dipercaya oleh masyarakat, akan tetapi media sering juga keluar dari koridor atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Namun media elektronik maupun cetak sering sekali di gunakan oleh para Elit sebagai alat kampanye pada momen pilpres atau pilek. Para Elit politik menggunakan media sebagai alat untuk menarik simpatisan atau



sura masyarakat, media juga tidak mau terlepas sebagai bahan politik yang digunakan oleh orang-orang Elit yang memberi kartel atau oportunistik pada saat mendapatkan kursi di pilpres atau pileg.

Kondisi politik yang dibangun di dalam berbagi ruang virtual (*seperti cyberspace*), yang memengaruhi bentuk, penampakan, nilai, dan kebenaran politik itu sendiri. Media merupakan ruang untuk perbuatan pengaruh para Elit politik, baik yang berada di dalam pemerintah maupun yang di luar pemerintah, berupaya mendapatkan akses yang lebih lama dan luas untuk mempengaruhi persepsi masyarakat tentang politik, realitas politik, kebijakan dan lembaga pemerintah yang sedang berkuasa.

Dunia virtual, sebagaimana dikatakan oleh Michel Hardt dan Anthony Negri adalah dunia yang melampaui ukuran, dalam pengertian bahwa tidak ada mekanisme yang dapat mengukur kekuatan nilai, atau batas, yang hanya mungkin dilakukan di dalam dunia yang mempunyai batas-batas. Di dalam dunia virtual tidak ada lagi sekala yang tepat dan dapat digunakan untuk mengukur nilai, kekuatan, atau batas tersebut, disebabkan semuanya bergerak dan berpindah ke arah konstitusi nilai-nilai yang melampaui ukuran. Problem pengukuran (kekuatan, nilai, batas) di dalam dunia virtualitas disebabkan dunia tersebut dibangun oleh sebuah tempat yang berciri ketak-bertempat-an (*non-place*). Tidak ada yang disebut tempat dalam pengertian yang sebenarnya dalam dunia virtual, yang mengenal batas-batas teritorial. Dengan demikian, salah satu pengertian dunia virtualitas adalah seperangkat kekuatan atau bertindak



(mengada, mencintai, mentransformasikan, mencipta) yang berada di dalam ketidak berhinggaan, artinya dalam ketidak berbatasan dan ketidak terbatas (Yasraf A. Piliang: 2005,29).

Komunikasi politik merupakan kajian sangat menarik. Alasannya adalah karena kajian ini memiliki kajian praktis yang berguna bagi para pelaku dan partisipan politik, baik kalangan Elit politik maupun gerakan rakyat. Siapa saja yang melihat bahwa dunia tidak dapat dilepaskan dari reaksi kekuasaan, maka ia akan meyakini bahwa relasi kekuasaan tidak akan dapat dilepaskan dari proses komunikasi (Nurani Soyomuki, 2013:7-17).

Komunikasi politik merupakan persilangan antara ilmu politik dan ilmu komunikasi. Pembahasan ini berfokus pada proses penyampaian pesan melalui media yang juga bersifat politis. Sama seperti pesan, media dan saluran politik formal seperti negara dan lembaga-lembaga politik lainnya juga memiliki kekuatan politik lainnya. Secara garis besar, politik berkenaan dengan gejala kekuasaan, kewenangan pengaturan, ketaatan dan ketertiban. Jika kita sederhanakan lagi, sama halnya dengan kewenangan dan pengaturan, kekuasaan (*power*) dan pengaruh (*influence*) merupakan suatu keseimbangan dan konsekuensi logis. Sedangkan ketaatan dan ketertiban adalah akibat dan tujuan. Dengan demikian, politik berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), dan ketaatan atau ketertiban (*order*).

Dalam kehidupan kita sehari-hari istilah politik sudah tidak begitu asing lagi terdengar di telinga, karena segala sesuatu yang



dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kekuasaan, sering kali diatasmamakan kepentingan kelompok tersebut. Dalam mekanisme pengaturan tersebut tergambar kewenangan pemerintah untuk mengatur dan memakas. Kewenangan tersebut terlihat dari adanya sanksi atau denda untuk sebuah ketidaktatan pada mekanisme. Namun di negara ini politik berkembang yang begitu pesat tidak bisa terlepas dari dua klasifikasi yaitu: politik kartel merupakan politik yang menopang pemerintah untuk melakukan koalisi, sedangkan politik oportunistik merupakan politik lewat bagi-bagi kursi atau kekuasaan. Peran lembaga politik yang semestinya untuk mewujudkan dan kesejahteraan masyarakat, tersandara oleh kepentingan-kepentingan yang terselubung yang bergelut di dunia perpolitikan (Lukas S. Ispandriarno, 2014:vii).

Bayangkan sebuah dunia politik, yang di dalamnya tidak ada ruang publik, melainkan ruang digital politik, tidak ada kebenaran politik melainkan manipulasi politik, tidak ada realitas politik melainkan fatamorgana politik, tidak ada kebijakan politik melainkan permainan bebas politik, tidak ada transendensi politik melainkan imanensi politik inilah dunia politik. Setidak-tidaknya isu utama yang mengemuka di dalam wacana pemikiran politik, dewasa ini sebagai akibat dari berbagai perubahan yang disebabkan dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir beserta berbagai efek sosial kemanusiaan yang di timbulkannya.

Perkembangan yang disebut abad informasi, abad citra atau abad virtual akhir-akhir ini telah memengaruhi bagaimana politik



itu di pandang. Tiga isu sentral politik di dalam abad informasi ini adalah:

Pertama, geopolitik yaitu terjadinya perubahan mendasar tentang fungsi atau wilayah teritorial, khususnya bagaimana politik dipandang di dalam dunia yang tanpa sekat dan di dalam era transparansi yang di ciptakan oleh abad informasi dan globalisasi. Pemahaman tentang politik, dalam pengertiannya yang paling luas, kini sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberadaan tempat, wilayah, atau teritorial sebagai suatu kesatur utuh dan menjadi prasyarat politik.

Kedua, politik ruang yaitu apa yang di dalam teori-teori politik secara tradisional disebut ruang publik kini mengalami berbagai transformasi mendasar, sebagai akibat dari perkembangan ruang-ruang maya yang diciptakan dalam jaringan teknologi informasi. Di dalam ruang informasi tersebut, ruang publik fisik diambil alih dan di ubah ke arah ruang publik virtual. Perkembangan teknologi informasi mutakhir telah menciptakan pergeseran atau imigrasi masyarakat politik dari ruang publik fisik ke dalam ruang publik virtual, yang di dalamnya berbagai aktivitas politik kini dilakukan secara virtual.

Ketiga, persoalan politik waktu yaitu bagaimana tempo kehidupan di dalam masyarakat informasi yang di picu oleh berbagai bentuk teknologi informasi, yang telah menggiring berbagai aktivitas politik ke dalam tempo kecepatan dan percepatan yang tinggi, yang didalamnya tahap tertentu berpengaruh pada esensi politik itu sendiri. Di dunia politik yang dibangun oleh tempo yang cepat tersebut, kekuasaan politik tidak



dapat lagi dibangun dalam bentuk kekuasaan teritorial itu sendiri, akan tetapi lebih jauh lagi kekuasaan atas kecepatan, beserta pengetahuan yang membangun.

Kampanye adalah aktivitas komunikasi politik yang ditujukan untuk mengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Dalam komunikasi politik kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Sedangkan menurut Imawan kampanye adalah upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan agar mereka bersedia dan mendukung.

Media virtual dipilih oleh Elit politik sebagai alternatif komunikasi politik yang menjanjikan selain karena saat ini dan ke depan perkembangan masyarakat tidak dapat menolak adanya digitalisasi penyampaian pesan. Apalagi para pemilih pemua dan muda adalah mereka yang sangat akrab dengan dunia digital dan sebagai pemilih rasional. Selain itu kecepatan penyebaran pesan secara virtual lebih cepat dan akurat pada sasaran komunikasi. Media virtual dianggap sebagai pemasaran politik dan alat propaganda politik yang efektif dan murah. Meskipun hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan budaya politik lama yang masih kuat di masyarakat, yakni politik "sembako".

Pemasaran politik adalah sebuah konsep baru yang belum begitu lama dikenal dalam kegiatan politik. Ia merupakan konsep yang diintroduksi dari penyebaran ide-ide sosial di bidang pembangunan dengan meniru cara-cara pemasaran komersial,



tetapi orientasinya lebih banyak pada tataran kesadaran, sikap, dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru. Pemasaran sosial berorientasi pada upaya untuk memasyarakatkan ide-ide sosial terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakat untuk menerima pembaruan. Dari konteks aktivitas politik, pemasaran politik dimaksudkan adalah penyebaran informasi tentang kandidat, partai, dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik melalui saluran-saluran komunikasi tertentu yang ditunjukan kepada segmen (sasaran) tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap, dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Media virtual memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang modern. Dalam hal ini, media virtual hidup sebagai penyambung lidah bahkan jembatan informasi yang lebih unggul dan marketabel untuk mengubah persepsi dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Media virtual pun menjadi sumber informasi yang dapat membentuk pandangan publik, selalu menyajikan beragam informasi yang aktual dan dikonsumsi masyarakat secara luas.

Media virtual dengan kekuatan konsep dan teknologinya menyajikan informasi atau berita yang mampu menyebabkan masyarakat menjadi percaya terhadap segala informasi yang disajikan. Informasi yang diterima oleh masyarakat belum tentu sepenuhnya atau secara lengkap diserap, sehingga akan menimbulkan distorsi pesan. Dengan terjadinya distorsi maupun disinformasi, maka akan dapat menghasilkan sikap yang salah. Sikap yang salah inilah yang nantinya akan memberikan dampak



buruk bagi masyarakat (Wawan Kuswandi: 2008, 11). Selain itu, media massa menyajikan informasi yang diolah sedemikian rupa agar menjadi berita hingga kemudian dapat membentuk dan menciptakan citra bagi suatu instansi maupun individu. Pertanyaan yang mendasar, apakah media menggambarkan dunia sebagaimana fakta dan peristiwa (keadaan dunia), berdasarkan pikiran manusia khalayak media, atau media menciptakan pemahaman sendiri atas dunia berdasarkan kecenderungan pemahaman organisasi dan pengelola media.



MEDIA DAN KOMUNIKASI ELIT POLITIK

A. Lahirnya Media Baru

Media konvensional telah lama dikritisi karena kecenderungan bias pemberitaannya yang bertolak-belakang dengan peran media sebagai institusi sosial. Alasan lain adalah kentalnya orientasi kepentingan ekonomi dan keterkungkungan pada prinsip obyektivitas dalam memberitakan isu-isu politik. Di negara-negara demokratis, tren ini terus berulang. Deregulasi sebagai konsekuensi dari liberalisasi ekonomi dan politik, makin menegaskan kecenderungan media untuk mengabdikan pada kepentingan kapital. Sebaliknya, di negara-negara otoriter - totaliter, media mengalami represi dan sensor yang ketat. Media menjadi bagian dari alat propaganda penguasa otoriter.

Sementara itu, demokrasi membutuhkan warga negara yang *well-informed*. Warga negara yang punya kesadaran politik merupakan kekuatan demokrasi, karena dalam demokrasi warga negaralah yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Pilihan politik warga negara menentukan kualitas kepemimpinan. Pilihan politik yang rasional dan kritis hanya



dapat terbentuk jika tersedia sumber informasi yang substantif dan berkaitan dengan kepentingan mereka. Sehingga, peran media dalam menyediakan informasi yang berkualitas, substantif, terkait kepentingan rakyat, dan memberi evaluasi atas jalannya pemerintahan merupakan modal mendasar.

Selanjutnya, media dalam demokrasi juga berperan sebagai ruang publik. Ruang publik adalah wahana di mana warga negara dapat saling mengutarakan pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai kepentingan mereka. Lewat ruang publik yang demokratis, akan terbentuk opini publik sebagai modal politik dalam mengarahkan jalannya pemerintahan. Ruang publik yang ideal hendaknya memberi kesempatan yang sama bagi tiap warga negara untuk terlibat dalam deliberasi publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Namun, media konvensional khususnya televisi sudah jauh dari cita-cita ruang publik ini. Televisi lebih condong memperjuangkan kepentingan kalangan Elit. Orang-orang yang terlibat dalam diskusi politik hanyalah para Elit penguasa, pejabat publik, dan para petinggi partai politik. Deliberasi di ruang publik pun menjadi sangat elitis dan jauh dari kesulitan hidup sehari-hari masyarakat, sebab lebih cenderung sebagai perebutan kekuasaan antar Elit. Untuk keseluruhan fenomena ini Habermas (1989: 142) mengatakan bahwa ruang publik, sebagaimana masyarakat itu sendiri telah mengalami refeudalisasi.

Krisis ruang publik dan komunikasi politik yang ditampilkan



media konvensional, membuat teknologi media baru makin menampakkan karakter transformatifnya. Artinya media baru menjadi jawaban tepat untuk merevitalisasi kembali ruang publik dan komunikasi politik yang sudah terkolonialisasi oleh kepentingan modal.

Peran internet sebagai media baru sudah ditunjukkan lewat peran mailing-list group "*apakabar*" yang dimoderatori oleh John A. MacDougall dalam "perjuangan" menumbangkan Orde Baru tahun 1997. Fakta lain yang tak lebih optimistik adalah kesuksesan Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk memenangkan pemilihan presiden terakhir berkat mobilisasi berbagai bentuk media baru untuk menggalang dana, dukungan, sukarelawan, dan simpatisan. Selain itu, dua kasus yang pernah terjadi di awal periode KPK menjadi contoh kekuatan internet, yakni penggalangan kekuatan *netizen* mendukung Prita Mulyasari, juga penggalangan *netizen* terhadap wakil ketua KPK, Slamet Bibit Riyanto dan Chandra Hamzah.

B. Media dan Demokrasi

Demokrasi dan media memiliki hubungan yang resiprokal. Di satu sisi demokrasi membutuhkan media sebagai alat komunikasi politik, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, di sisi lain media hanya dapat berfungsi bagi kepentingan masyarakat luas dalam sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang demokratis dimaksudkan untuk membedakannya dari sistem otoritarian atau totalitarian.



Hubungan saling membutuhkan antara media dan demokrasi dapat ditelaah dari dua sudut pandang secara simultan, yaitu: sudut pandang makro dan sudut pandang mikro (Mughan & Gunther, 2000). Sudut pandang makro melihat struktur dalam sistem media dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi politik. Pada umumnya, karakter sistemik yang paling berpengaruh adalah pola peraturan pemerintah, pola kepemilikan media, pola program acara, struktur audiens, dan karakter penonton (*viewership*). Sementara pendekatan mikro lebih fokus pada investigasi efek komunikasi politik pada tingkat individual.

Dengan demikian, sukses-tidaknya media dalam membangun demokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Sekadar contoh, pada tingkat mikro, walaupun media sudah berusaha untuk memfokuskan pemberitaan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara kritis, namun jika masyarakat tidak memiliki cukup kapabilitas untuk menerima informasi tersebut secara rasional, maka berita tersebut menjadi tidak banyak bermakna. Faktor yang mempengaruhi kapabilitas individual ini mencakup ketertarikan pada isu publik, kemampuan literasi, punya akses terhadap media, dan lain-lain.

Idealnya, dalam demokrasi setiap warga negara sudah memiliki kesadaran politik yang cukup. Dengan kata lain dia tidak hanya mampu memahami isu-isu politik, melainkan sadar dan terdorong untuk mencari informasi yang dia gunakan sebagai pedoman untuk menentukan pilihan politiknya. Faktor-

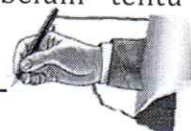


faktor inilah yang ada pada tingkat mikro.

Pada tingkat makro, media awalnya ditentukan oleh sistem politik. Sistem politik yang otoriter akan membentuk corak media yang terkungkung. Sistem politik yang demokratis akan menghasilkan media yang liberal (Hackten, 1981; Siebert, Peterson, & Schramm, 1963). Namun realitas politik di dunia saat ini, khususnya setelah perang dunia kedua, media lebih tepat ditempatkan dalam konteks politik demokrasi. Walaupun harus diakui bahwa keberadaan media dalam konteks politik demokrasi, tidaklah serta-merta akan menjadi tulang-punggung proses menuju demokrasi yang substantif.

Sejalan dengan itu, pada tingkat makro terdapat dua model pengaturan media, khususnya media penyiaran, yaitu: *public service model*³ dan *commercial model*⁴, seperti yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Perbedaan yang paling utama antara keduanya adalah: *public service broadcasting* lebih fokus pada berita dan isu-isu publik, features, dokumenter, art, musik, permainan, sementara *commercial broadcasting* lebih menekankan hiburan (Mughan & Gunther, 2000: 10). Sehingga kedua model ini akan memberikan kadar kontribusi positif yang berbeda pada demokrasi. Pada intinya, sistem penyiaran publik lebih menyediakan kesempatan bagi tumbuhnya demokratisasi lewat fungsi media.

Sementara media dalam sistem otoritarian sudah pasti tidak akan berpihak pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena media telah diambil alih oleh politisi sebagai alat propaganda. Sementara itu, dalam demokrasi media juga belum tentu



berpihak pada kepentingan masyarakat: keberpihakan itu misalnya dapat ditunjukkan lewat orientasi pemberitaannya. Ketidak-berpihakan media pada demokrasi ini disebabkan oleh media telah banyak mengabdikan pada kepentingan bisnis. Pada akhirnya media konvensional (khususnya televisi) yang awalnya diharapkan dapat berperan sebagai ujung tombak sarana komunikasi politik dan ruang, malah tergerus oleh kepentingan pemilik modal. Media konvensional pada hakekatnya merupakan lembaga bisnis. Walaupun eksistensinya pada awalnya ditentukan oleh faktor politik dan teknologi, namun dalam keberlangsungan hidupnya lebih ditentukan oleh faktor ekonomi. Di tengah ironi media dalam demokrasi inilah muncul kekuatan baru berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi media baru dalam konteks ini menjadi variabel independen untuk mengubah corak komunikasi politik dalam demokrasi. Media baru, khususnya internet dan *world wide web*, merupakan hasil revolusi teknologi komunikasi dan informasi. Media baru ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik. Walaupun masih baru, tetapi harapan besar ditujukan pada media ini untuk berbagai segi kehidupan karena karakter memungkinkan (*enabling*) yang dimilikinya. Serta secara struktural, media baru sangat jauh berbeda dengan media konvensional baik dalam konten (isi), fungsi, institusi, maupun akses publik (Tabel 1).

Kekuatan media baru ini diyakini akan menguatkan demokrasi. Asumsi ini didasarkan pada kesesuaian antara



karakter media baru dan karakter demokrasi. Demokrasi mencerminkan kesetaraan, pengakuan atas perbedaan, kebebasan, partisipasi, dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Dalam media baru nilai-nilai demokrasi tersebut terealisasi. Media baru membuka ruang yang bebas (bahkan cenderung tak terbatas), ditopang oleh prinsip kesetaraan (*equality*), dan kebebasan (*freedom*), serta setiap orang punya peran sebagai pencipta (*producer*) yang independen. Kekuatan lain media baru terletak pada kemampuan partisipatifnya. Partisipasi sesungguhnya adalah prinsip dasar demokrasi. Benjamin Barber (1990: 8) mengatakan bahwa partisipasi, pada akhirnya, memperluas (*enhances*) kekuatan masyarakat, dan mewujudkannya dalam sebuah kekuatan moral, sesuatu yang dalam sistem politik non-partisipatif tidak terjadi.

C. Ruang Publik dan Deliberasi Politik

Demokrasi menjadi sistem politik paling populer di era modern ini. Bentuk demokrasi yang diterapkan merupakan demokrasi perwakilan, sebab model inilah yang paling ideal dan efektif untuk saat ini dibanding model lainnya. David Held (1995:5) menjelaskan bahwa, secara umum ada tiga tipe demokrasi, yaitu: demokrasi langsung (*direct democracy*), demokrasi perwakilan (*liberal/ representative democracy*), dan demokrasi satu partai.

Demokrasi langsung adalah sebuah sistem pengambilan keputusan tentang kepentingan publik di mana warga negara



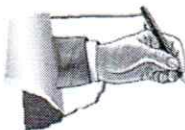
terlibat langsung. Negara kota, disebut juga *polis* di Athena, dipimpin oleh gubernur warga negara (*citizen-governors*) di mana tercermin bahwa hampir tidak ada batasan antara negara dan masyarakat. Dengan kata lain, pada zaman Athena kuno rakyat (*citizen*) pada saat yang sama menjadi bagian dari otoritas politik yang berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan. Masyarakat (*demos*) terlibat dalam bidang fungsi legislatif dan yudikatif, sebab konsep masyarakat Athena tentang kewarga-negaraan (*citizenship*) menuntut keterlibatan aktif mereka dalam fungsi tersebut yaitu berpartisipasi secara langsung dalam hal urusan negara. Model demokrasi ini tentu tidak terlalu membutuhkan mekanisme yang kompleks dalam mencapai keputusan-keputusan penting terkait dengan jalannya pemerintahan.

Selain kesepakatan masih mudah untuk dicapai, kompleksitas kepentingan kehidupan sebagai negara pun masih rendah.

Tabel 1: Karakteristik Media Konvensional vs Media Baru

(Diolah dari Sparks, 2001; Pavlik, 1996)

Karakter		Media Konvensional	Media Baru
1	Isi	Cenderung terbatas, adanya sensor, pembatasan oleh <i>space</i> , unsur lokalitas	Tidak terbatas, transparan, prinsip global, bebas, publikasi isi cepat



2	Orientasi fungsi	Kelas elit, mengabaikan universalitas publikasi	Semua kalangan, akses universal
3	Institusi	Terpusat, dikendalikan oleh pemilik, adanya konsentrasi kepemilikan, membutuhkan modal besar	Terdesentralisasi, fleksibel, anonimitas, pengguna sebagai pemilik, hanya untuk modal akses
4	Akses publik	Rendah, satu arah	Sangat luas, multi-arrah, interaktif, kebebasan, kesetaraan (<i>equality</i>)

Demokrasi liberal' adalah suatu sistem pemerintahan yang dibentuk dengan memilih para pejabat negara yang bertugas untuk mewakili kepentingan dan pandangan- pandangan warga negara dari batas wilayah tertentu dengan berpatokan pada penegakan hukum yang berlaku. Demokrasi sekarang ini sulit menerapkan model demokrasi klasik yang bersifat langsung. Demokrasi modern lebih mengadopsi demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, walaupun di beberapa negara masih terdapat demokrasi dengan tipe satu partai tunggal seperti di negara-negara komunis-sosialis.

Demokrasi perwakilan yang populer itu tidak luput dari pembusukan politik. Liberalisasi politik menyebabkan konsep perwujudan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berubah menjadi ajang kompetisi antarelit semata. Konsep "demokrasi" yang mulia dialihkan menjadi sarana untuk melanggengkan kekuasaan dan menimbun materi oleh para



penguasa. Pada saat yang sama, masyarakat menjadi diabaikan keberadaannya. Barber (1990:147) menjelaskan bahwa:

“Representative democracy suffers, then, both from its reliance on the representative principle and from its vulnerability to seduction by an illicit—from the illusion that metaphysics can establish [...] By subordinating the will and judgment of citizens to abstract norms about which there can be no real consensus, these mode demean citizenship itself and diminish correspondingly the capacity of the people to govern themselves.”

Jalan keluar bagi kebuntuan politik tersebut adalah menegakkan demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif (*participatory democracy*) merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung (*direct democracy*). Van Dijk (2000: 43) menjelaskan bahwa demokrasi partisipatoris mendasarkan kinerjanya pada warga negara (*citizens*) secara substansial daripada ke organisasi atau lembaga-lembaga negara.

Pusat dari demokrasi partisipatif adalah warga negara. Maka demokrasi deliberatif yang menempatkan partisipasi warga negara sebagai pilar utama dalam sistem politik sangat relevan dengan kehadiran teknologi media baru. Demokrasi deliberatif, menurut Bohman (1996) secara teoritis memiliki empat ciri, yaitu:

1. Menekankan keutamaan deliberasi untuk membuat keputusan politik;
2. Sifat normatifnya sangat kuat, dalam arti menolak reduksi atas politik pada rasionalitas strategis dan instrumental



3. Bersifat proseduralis
4. Bersifat universalis

Dalam politik demokrasi deliberatif terdapat kekuatan tindakan komunikatif pada forum publik. Proses deliberasi dalam forum terbuka tersebut adalah sebuah proses di mana warga negara berusaha untuk meyakinkan warga lainnya untuk menerima kebijakan yang diusulkan dengan berlandaskan penggunaan *reason* di hadapan publik (*public use of reason*) dalam proses dialog deliberatif yang *take and give* (Bohman, 1996: 15). Peran ruang publik dalam proses ini menjadi sangat penting. Demokrasi yang dibangun secara diskursif lewat ruang publik tersebut merupakan “rumah” bagi konstestasi berbagai wacana, di mana pada proses komunikasi tersebut harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: mampu merangsang pemikiran reflektif, non-koersif, dan mampu menghubungkan pengalaman individual atau kelompok dengan sebuah prinsip yang lebih umum (Dryzek, 2003:9-10).

Sejalan dengan itu, Bohman (1996) menyebutkan bahwa proses deliberasi dapat berhasil jika dipenuhi tiga syarat, yaitu:

1. *The non-tyranny condition sets institutional limits to the deliberative process so that no one group consistently maintain an undue poweradvantage.*
2. *A condition of equality must be met; all citizens must haveanequal access to decision making process.*
3. *Deliberation is “fully democratic” when it is public both in its weak and its strong senses.*



Media konvensional, khususnya televisi, sebenarnya memiliki kualitas yang tepat dalam mengembangkan model demokrasi deliberatif ini. Sifat mediumnya yang mampu menghadirkan pesan audio-visual menjadi kekuatan tersendiri ketika ditayangkan secara *live* untuk sebuah acara dialog. Diskusi “interaktif” yang menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, warga masyarakat, akademisi, LSM, dan lain-lain, akan menciptakan kesepahaman yang lebih komprehensif. Tetapi, secara kuantitas dan kualitas, aksesibilitas menjadi rintangan tersendiri bagi masyarakat untuk berpartisipasi lewat media televisi. Televisi sebagai ruang publik pun menjadi minimalis.

Ruang publik (*public sphere*) merupakan sebuah ruang yang mudah diakses tanpa batas, bebas dari tekanan kekuasaan negara dan ekonomi, di mana warga negara melakukan pembicaraan politik guna mewujudkan suatu kesepahaman bersama terkait dengan kepentingan umum yang lebih luas. Konsep dasar ruang publik ini terungkap dari pemikiran Habermas (1989). Ruang publik merupakan “tempat” untuk berkomunikasi sebagai elemen pembentuk kehidupan sosial (*life-world*) yang bersandar pada rasionalitas komunikatif anggota masyarakat. Habermas mengungkapkan sejumlah definisi tentang ruang publik tersebut sebagai berikut:

The public sphere is private persons making public use of their reason (Habermas 1989: 27); populated by private people gathered together as a public and articulating the needs of society with the state (Habermas 1989: 176); a realm of our social life in

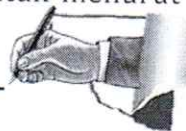


which something approaching public opinion can be formed (Habermas 1974:49).

Bagi Habermas suatu masyarakat ditopang oleh dua elemen dasar, yaitu sistem (*system*) dan dunia kehidupan (*life-world*). Sistem (seperti: politik, ekonomi) digerakkan oleh rasionalitas instrumental yang berupaya menghadirkan kontrol. Sementara dunia kehidupan ditopang oleh komunikasi, kesepakatan, dan konsensus di mana bahasa menjadi alatnya. Dunia kehidupan disusun oleh tiga elemen yaitu: budaya, masyarakat, dan kepribadian. Kepribadian di sini merupakan kompetensi seseorang untuk berbicara dan bertindak dalam mencapai suatu pemahaman. Kompetensi komunikasi yang diperlukan guna kesepahaman tersebut didasarkan pada rasionalitas kritis. Oleh sebab itu, *public sphere* sebagai konteks di mana terjadi tindakan komunikasi yang kritis hanya dapat terjadi dalam dunia kehidupan (Baxter, 1987). Namun, dalam masyarakat kapitalis modern, keberadaan sistem acapkali mengekang dunia kehidupan yang ada, sehingga mengancam keberlangsungan komunikasi.

Setidaknya terdapat empat "elemen" penting dalam ruang publik, yaitu: hadirnya *private persons*, *use of reason*, *need articulation*, dan *public opinion*. Jadi, debat politik dalam acara televisi (*TV debates*) maupun pada program dialog pada program *current affairs* merupakan upaya untuk merealisasikan elemen-elemen penting tersebut.

Media massa hanyalah salah satu dari bentuk ruang publik modern. "Dunia" di mana opini publik akan terbentuk menurut



Habermas (1989), pada awalnya bermula dari perkembangan kelas borjuis pada abad ke-16 dan -17 di Inggris, Jerman, dan Prancis. Ruang publik pada masa itu berupa balai kota, warung kopi, salon, dan pada akhirnya ditemukan *newsletter* dari para penguasa atau pedagang. Isi dari *newsletter* ini adalah seputar harga-harga barang, pajak, serta peraturan pemerintah. Sementara, ruang publik modern awal adalah surat kabar (1700-an), kemudian radio (1920-an), dan televisi (1950-an), serta yang terakhir adalah internet (1970-an). Kini, Internet disebut juga sebagai ruang publik *post-modern*.

Supaya ruang publik sebagai ruang perbincangan politik (*political talk*) dapat memberi kontribusi pada demokrasi, maka proses deliberasi tersebut harus berbeda dari percakapan biasa. Perbincangan dalam ruang publik harus menggunakan tindakan komunikatif masing-masing individu yang terlibat secara rasional. Habermas menjelaskan perbincangan dalam ruang publik ideal perlu mencerminkan kriteria-kriteria:

Comprehensibility, truth, truth fullness, dan rightness (Habermas, 1984). Sejalan dengan itu Dahlberg (2004) menyatakan enam syarat deliberasi dalam ruang publik ideal, yaitu: *exchange and critique of reasoned moral-practical validity claims, reflexivity, ideal role taking, sincerity, discursive inclusion and equality, autonomy from state and economic power*.

Kriteria-kriteria tersebutlah yang hendaknya digunakan oleh para politisi dalam mengambil suatu keputusan politik. Dari sisi warga negara, kehadiran internet sebagai ruang publik sangat memungkinkan menerapkan kriteria-kriteria tersebut. Sehingga,



internet sebagai ruang publik dapat sungguh-sungguh berkontribusi pada demokrasi lewat penguatan masyarakatnya di tengah-tengah negara.

Media baru adalah semua bentuk media yang menggabungkan tiga unsur C, yaitu: *computing and information technology* (IT), *communication network*, dan *convergence* (*digitalized media and information content* (Flew, 2005: 2). Media baru yang dapat juga disebut *digital media*, memiliki ciri-ciri di mana informasi menjadi mudah dimanipulasi, berjejaring, padat, mudah diperkecil, dan seolah tidak punya pemilik.

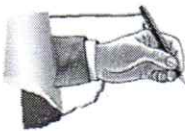
Sebagian kalangan menganggap media baru berbeda dengan media sosial. Media sosial merupakan seluruh bentuk media jejaring di internet yang berfungsi untuk menciptakan jejaring komunitas virtual, seperti *Facebook* dan *Twitter*. Pada kesempatan ini media sosial dipandang sebagai bagian dari media baru. Artinya media sosial adalah salah satu bentuk media baru. Dalam konteks politik, media baru yang paling banyak diaplikasikan selain *homepage* atau *website* dan *e-mail* adalah bentuk-bentuk media jejaring tersebut. Media jejaring atau media sosial ini memiliki ciri politis karena dapat menyatukan para pengguna secara virtual layaknya sebuah organisasi dalam kehidupan nyata.

Antony Mayfield (2008) dari organisasi *iCrossing* menjelaskan bahwa, media sosial lebih tepat dipahami sebagai *a group of new kinds of online media*, yang memiliki karakteristik berikut:



1. **Participation:** *social media encourages contributions and feedback from everyone who is interested. It blurs the line between media and audience.*
2. **Openness:** *most social media services are open to feedback and participation. They encourage voting, comments and the sharing of information. There are rarely any barriers to accessing and making use of content – password-protected content is frowned on.*
3. **Conversation:** *whereas traditional media is about “broadcast” (content transmitted or distributed to an audience) social media is better seen as a two-way conversation.*
4. **Community:** *social media allows communities to form quickly and communicate effectively. Communities share common interests, such as a love of photography, a political issue or a favourite TV show.*
5. **Connectedness:** *Most kinds of social media thrive on their connectedness, making use of links to other sites, resources and people.*

Sejalan dengan itu, setidaknya hingga saat ini media sosial dapat dibedakan ke dalam enam jenis, yaitu: *social networks* (Friendster, MySpace, Facebook, Bebo), *blogs* (blogspot, wordpress, multiply), *wikis* (Wikipedia), *podcasts* (iTunes), *forums* (mailing list, website), *content communities* (*flickr*, *del.icio.us*, *YouTube*), dan *microblogging* seperti *Twitter* (Mayfield, 2008). Keseluruhan bentuk media sosial ini telah digunakan secara simultan, dan saling terhubung.

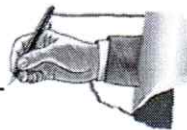


Struktur media baru yang memberi kontribusi pada ruang publik adalah yang dapat memfasilitasi proses perbincangan politik secara *in-group*. Maka media yang lazim dipakai adalah *social networks*, *blog*, dan *mailing list*. Peter Dahlgren (2005: 153) menyatakan bahwa bentuk ruang publik *virtual* di media baru (*net-based public sphere*), bisa diklasifikasi dalam lima kategori, yaitu *e-government*, *advocacy/activist domain*, *civic forums*, *parapolitical domain*, dan *journalism domain*.

Dengan sifatnya yang virtual, interaktif, konvergen, dan global, maka internet hadir sebagai ruang publik yang lebih luas. Media baru membentuk ruang publik berskala internasional.

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi bagi politik dan demokrasi dapat dibagi dalam empat kategori (van Dijk, 2000: 40), yaitu:

1. **Allocution**, menyangkut aspek- aspek: *computerized election campaigns*, *computerized election information*, *computerized civic service and informationcenters*.
2. **Consultation**, menyangkut aspek- aspek: *mass public information system*, *advanced public information system(internet)*.
3. **Registration**, menyangkut bidang: *registration system for government and public administration*, *computer-assisted citizens enquiries*, *electronic polls*, *electronic referenda*, *electronic elections*.
4. **Conversation**, mencakup bidang: *bulletin board systems*, *discussion lists*, *electronic mail and teleconferencing*,

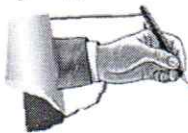


electronic town halls, group discussion support system.

D. Platform Media Baru Interaktif

Struktur *platform* media baru menjadi faktor paling menentukan kualitas interaktif untuk komunikasi politik warga. Sebagian besar *platform* media baru masih berfungsi untuk mengekspresikan opini secara dialogis, kalau bukan personal. Masih sangat terbatas design media baru yang sungguh-sungguh menghidupkan interaktivitas secara merata. Artinya diperlukan usaha tambahan untuk menciptakan ruang interaktif sesuai dengan sistem *design* bahasa pemrograman komputer.

Twitter, Facebook, dan blog/website sebagai bentuk media baru paling tren menawarkan potensi untuk ruang interaktif tersebut. Dulu sempat ada sebuah *web blog* yang sengaja dirancang untuk diskusi politik yaitu Politikana.com, tetapi sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini, diskusi yang menekankan unsur interaktif ini terlihat pada kolom komentar yang tersedia baik pada *website media, blog, Facebook, Twitter, maupun Youtube*. Sebagai gambaran berikut ditunjukkan satu contoh diskusi di salah satu web berita media nasional. Dalam diskusi terkait ricuh pemungutan suara di Hongkong karena banyak yang tidak dapat memberikan suara mereka, para *netizen* membahas dengan serius. Dari 284 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut, terdapat 2685 komentar hingga satu hari setelah kejadian tersebut. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada upaya saling jawab antar para komentator tersebut yang memberi kualitas interaktif pada ruang diskusi.



E. Ruang Publik Baru di Indonesia

Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an ketika B. J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (1978-1998). B.J. Habibie sekaligus merupakan menteri pertama yang punya website di internet. Pada tahun 1986 Dewan Riset Nasional yang dipimpin oleh B.J. Habibie merekomendasikan agar dilakukan pengembangan layanan sains dan teknologi informasi di tanah air yang kemudian mengkristal dengan terbentuknya jaringan informasi internet IPTEKnet pada tahun 1989 yang dikelola di bawah Badan Penilaian dan Penerapan Teknologi (Sen and Hill, 2007). Pada tahun 1998/99, warung internet (warnet) mulai bermunculan di dekat kampus UGM, UNY, dan UAJY Mrican, Yogyakarta.

Seiring dengan penetrasi internet dari dunia bisnis yang begitu gencar, dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi juga berlomba-lomba untuk *go online*. Dari fasilitas *research archive* di perpustakaan hingga fasilitas wireless zone sudah tidak asing lagi di dunia kampus saat ini. Maka tidak heran juga pengguna internet di Indonesia hingga kuartar pertama tahun 2010 mencapai 30 juta orang dengan tingkat penetrasi pada tingkat 12,5% (www.internet-worldstats.com), bahkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memprediksi tahun 2014 terdapat 107 juta pengguna internet di Indonesia. Tahun 2018 terdapat 171,2 juta pengguna dan tahun 2020 194,6 juta pengguna (kompas.com). Artinya, ada tren peningkatan partisipasi masyarakat Indonesia di internet secara signifikan setiap tahunnya.



Media konvensional juga sudah melakukan digitalisasi. Institusi pendidikan, lembaga pemerintah, dunia bisnis, hingga *outlet boutique* kecil bisa punya ruang jualan secara online. Konvergensi dan digitalisasi menjadikan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan dan merespon informasi yang mereka butuhkan. Khusus media konvensional yang berorientasi pada berita selalu menyediakan ruang (*comment boards*) di mana komentar dan tanggapan bisa disampaikan. Komentar tersebut tidak ditujukan untuk redaksi, tetapi merupakan ekspresi politik yang kemudian dapat memicu tanggapan dari orang lain. Jadi, secara tidak langsung digitalisasi media konvensional dapat mendorong diskusi politik secara *online*.

Pada skala yang lebih luas, komunitas blogger dan forum diskusi politik online yang punya website sendiri merupakan ruang diskusi politik (*political talk*) yang paling representatif. Beberapa bentuk ruang diskusi online yang ada seperti: www.kompasiana.com, www.forum.detik.com, dan www.kaskus.com, dan yang lainnya, termasuk yang dibuat dalam platform media sosial seperti Facebook dan Twitter. Inilah struktur ruang publik yang transformatif yang bisa diakses secara bebas oleh siapapun (publik) di mana pun. Ruang publik transformatif ini meruntuhkan struktur ruang publik lama yang cenderung membatasi tidak hanya partisipasi, tetapi juga informasi lewat proses *gatekeeping*.

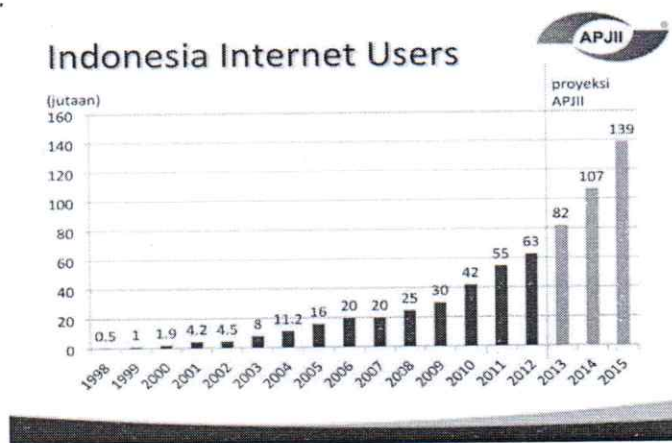


berkomunikasi. Struktur inilah yang berubah drastis pada media baru di banding media konvensional pendahulunya.

Transformasi yang digerakkan oleh media baru pada komunikasi politik terletak pada perubahan struktur komunikasi politik itu sendiri. Akibat yang paling signifikan dari perubahan struktur tersebut adalah posisi dan pengaruh aktor-aktor politik yang lebih setara (*equal*) baik dalam partisipasi maupun bobot diskursif yang dihadapkannya.

Struktur komunikasi politik merupakan salah satu sisi yang berubah secara signifikan berkat media baru ini. Komunikasi politik seperti dikemukakan Denton & Woodward merupakan:

"Pure discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanctions (what the state rewards or punishes)" (dikutip dalam McNair, 3003: 3).



Grafik 1: Tren Pengguna Internet di Indonesia

Sumber: <http://www.apjii.or.id/v2/read/page/halaman-data/9/statistik.html>

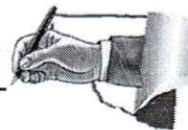


Penjelasan Denton & Woodward lebih menekankan komunikasi politik dalam tataran makro, yaitu pada tingkat struktur politik. Sementara McNair (2003: 4) melihat komunikasi politik lebih mikro. Dia membagi komunikasi politik ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the purpose of achieving specific objectives.*
2. *Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists.*
3. *Communication about these actors and their activities, as contained in news reports, editorials, and other forms of media discussion of politics.*

Walaupun McNair melihat komunikasi politik lebih khusus dan kategorikal, namun pola komunikasi politik yang dia jelaskan masih bersandar pada tradisi media konvensional. Hal itu terlihat dari bentuk skema komunikasi politik yang dia usulkan (McNair, 2003: 6). Jika boleh diringkas, maka komunikasi politik McNair terdiri dari dua bagian: *pertama*, komunikasi politik dari aktor politik menggunakan media kepada masyarakat, dan *kedua*, komunikasi politik dari warga negara lewat media kepada para aktor politik, atau oleh media sendiri kepada aktor politik.

Sehingga jika dibandingkan dengan model komunikasi politik klasik dari Harold D. Laswell, maka nyaris tidak ada bedanya. Formula Laswell (McQuail & Windahl, 1993: 12) yang terdiri dari: *"Who? Says what? In which channel? To whom? With*



what effect?" menegaskan bentuk komunikasi satu arah, dengan kata lain minim interaksi. Sebaliknya, komunikasi politik lewat media baru bersifat multi arah dan prosesnya sangat interaktif. Sifat desentralisasi dan interaktivitas yang melekat dalam media baru menopang sifat komunikasi politik menjadi sangat horizontal dalam wujud jejaring. Sehingga tidak ada satu aktor yang menguasai secara dominan jalannya proses komunikasi.

Obyek kajian komunikasi politik dalam era media baru sangat terdesentralisasi. Komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat baik secara vertikal, maupun horizontal menjadi fokus kajian dalam era konsolidasi demokrasi. Proses komunikasi politik menjadi datar dan menyebar. Hal ini sangat berbeda dengan konsep konvensional yang melihat komunikasi politik sebagai upaya untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih lewat iklan, kampanye, dan lain-lain. Dalam era media baru, kehadiran masyarakat makin kuat sebagai aktor politik. Masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintahan tanpa harus melalui perantara. Bentuk-bentuk komunikasi politik yang menyebar tersebut dapat digambarkan pada bagan2.

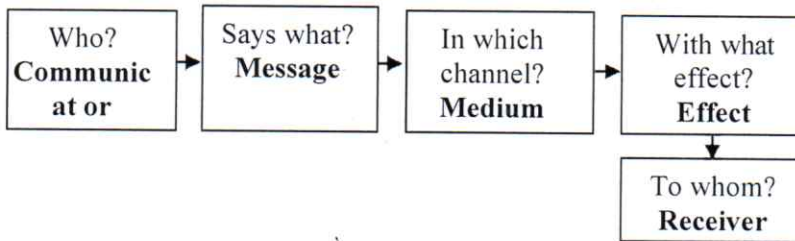
Komunikasi politik tingkat makro terjadi pada tataran struktur politik yang melibatkan lembaga-lembaga politik secara formal. Komunikasi politik pada tingkat meso terjadi pada lembaga-lembaga di luar struktur politik seperti media, partai politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Sedangkan komunikasi politik pada tingkat mikro berlangsung



di antara sesama anggota masyarakat sendiri. Komunikasi lintas tingkatan, misalnya antara mikro dengan makro (no. 4) menunjukkan hubungan antar warga negara dengan sistem politik, di mana internet dapat memberi kontribusi besar.

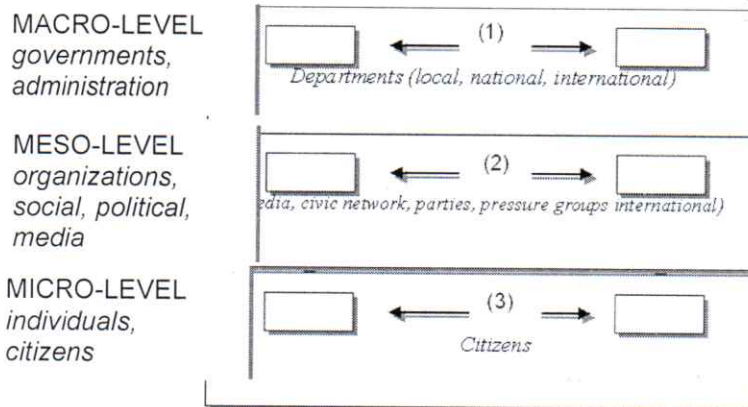
Bagan 1: Proses Komunikasi Lasswell

(Dikutipoleh:McQuail&Windahl,1993,hal.12)



Bagan 2: Tingkatan Komunikasi dalam Sistem Politik

(vanDijk&Hacker,2000:217)



G. Komunikasi Politik Transformatif di Indonesia

Penggunaan media baru untuk komunikasi politik yang lebih tren saat ini adalah *e-government*, kampanye lewat internet,



komunikasi politik online warga, serta relasi horizontal antara warga negara dengan warga negara lain baik dalam bentuk kelompok virtual maupun dalam konteks pendidikan politik antar warga. Sejak pemilu 2014 dan berikutnya muncul sejumlah kelompok masyarakat terdidik yang berupaya untuk memperkuat kesadaran politik warga negara lewat diseminasi informasi politik secara online yang dalam media baru menjadikan para *netizens* sebagai target.

H. E-Government: Government to Citizen

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi, seperti *wide area networks*, internet, dan *mobile computing*, oleh lembaga-lembaga pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan antara pemerintah dengan warga negara, bisnis, dan sesama elemen pemerintah lainnya (www.worldbank.org). *E-government* sering dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: *government to government* (G2G), *government to business* (G2B), dan *government to citizen* (G2C) (Bonham, et. al., 2001).

Sisi transformatif dalam *e-government* adalah warga negara dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah tanpa harus dibatasi ruang dan waktu lewat website berbagai lembaga pemerintahan. Demikian juga halnya pemerintah lebih intens dan efisien dalam menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan berbagai kecanggihan fasilitas media baru atau media sosial. Pelaksanaan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat



dapat dilakukan dua puluh empat jam sehari.

Beberapa website pemerintah yang cukup lengkap dengan layanan kemasyarakatan adalah DKI Jakarta (www.jakarta.go.id), Bandung (<http://bandung.go.id>), SumatraBarat (www.sumbarprov.go.id/), dan Riau (www.riau.go.id), dengan fasilitas mulai informasi mulai dari layanan komunikasi lewat email, download dokumen, agenda pejabat, staf, bahkan sampai pembuatan KTP serta pengurusan perizinan. Satu hal yang menarik perhatian adalah disediakannya Kolom Aspirasi atau rubrik untuk menyampaikan aduan dan kritik dari masyarakat. Tren ini seolah membangkitkan kembali spirit demokrasi langsung (*participatory democracy*) zaman Yunani kuno. Di samping itu, *e-government* dapat mewujudkan budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya (*accountable*). Wujud *e-government* ini berupa website pemerintahan di seluruh lini. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar.

1. Kampanye Politik Online: Political Elite to Citizen

Kampanye *online* ini bisa dilakukan secara perseorangan, bisa juga secara organisasional dari partai-partai politik. Kampanye online sangat marak dilakukan pada saat menjelang Pemilu, baik di tingkat nasional maupun lokal. Seiring dengan perkembangan aplikasi internet dalam politik mulai muncul tren pemilihan ketua organisasi atau partai politik menggunakan media online untuk mensosialisasikan pribadi kandidat dan

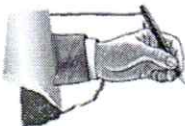


program kerjanya. Dalam konteks Pemilu contoh yang sangat tepat adalah keberhasilan senator Barack Obama dalam pemilu presiden di Amerika Serikat yang menjadikannya sebagai Presiden AS yang baru. Dua tujuan utama yang dicapai dari media baru tersebut adalah penggalangan sumbangan dan mobilisasi sukarelawan politik.

Di Indonesia sendiri sudah mulai terlihat politisi dan partai politik menggunakan media sosial guna menyebarluaskan informasi politik kepada masyarakat atau untuk sekedar mempertahankan jaringan yang sudah terbangun, khususnya lewat platform Twitter. Beberapa contoh sebagai berikut: @jokowi_do2 (Joko Widodo), @iskan_dahlan (Dahlan Iska), @aniesbaswedan (Anies Baswedan), @prabowo08 (Prabowo Subianto), @hattarajsa (Hatta Rajasa), dan @presidenSBY (Susilo Bambang Yudoyono).

Sejumlah partai politik membuat website informatif, akun *Facebook* dan *Twitter*. Sebagai contoh PDI-P ada di : id.facebook.com/DPP.PDI.Perjuangan; twitter.com/PDI_Perjuangan; dan website pdiperjuangan.org/?view=mosaic. Partai lainnya seperti Golkar: partaigolkar.or.id/; dan Partai NasDem: partainasdem.orgsertaPKB: pkb.or.id/, dan lain-lain. Meskipun demikian partai politik belum maksimal dalam memanfaatkan kekuatan media baru ini, sebagaimana terlihat pada website partai yang tidak atraktif dan tidak interaktif.

Kampanye politik yang selama Pemilu 2014 terjadi justru lebih banyak dilakukan oleh masyarakat akar rumput sebagai



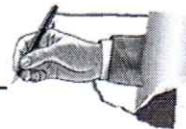
simpatisan dan relawan terhadap kandidat dan partai politik tersebut. Contoh dari kampanye relawan Jokowi seperti <http://baranews.co/>, <https://id.facebook.com/JOKOWI4ID>, dan aplikasi Jokowi4Presiden di *GooglePlay*.

2. Media Aspirasi Rakyat: Citizen to Elite

Salah satu bentuk perubahan struktur pada komunikasi politik adalah pola dan peran warga negara sebagai aktor politik itu sendiri. Komunikasi politik lewat media konvensional lebih menempatkan warga sebagai target yang harus dipengaruhi, agar menguntungkan bagi Elit yang berkepentingan. Warga bersikap sangat pasif. Bukannya hanya interaksi dengan Elit politik, komunikasi antar warga pun pada format media lama ini cenderung langka.

Media baru membentuk struktur komunikasi yang memungkinkan warga negara sebagai aktor politik, lepas dari bersentuhan dengan negara atau tidak. Bentuk komunikasi politik warga masyarakat secara online dapat berupa bentuk-bentuk berikut (disarikan dari Gibson et al., 2005):

(1) discussing politics in a chat group; (2) joining an email discussion about politics; (3) sending an e-postcard from a political organization's website; (4) signing an online petition; (5) sending an email to a politician; (6) sending an email to local or national government; (7) sending an email to a political organization; (8) participating in an online question and answer session with a political official.



Sayangnya masih ada kendala implementasi media baru untuk komunikasi politik masyarakat di Indonesia yaitu: *digital divide*. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan kebijakan informasi dan telekomunikasi yang berorientasi pada pemerataan akses teknologi. Agar akses universal atas teknologi informasi tersebut berdaya guna, maka secara simultan diperlukan pendidikan tentang teknologi informasi (*new media literacy*), baik lewat jalur formal maupun informal. Bentuk aplikasi media ini antara lain: website berita yang punya kolom komentar oleh pembaca, megablog kompasiana.com, serta akun sejumlah kelompok maupun pribadi di *Twitter* dan *Facebook* yang sering memicu diskusi politik.

3. Pendidikan Politik: Citizen to Citizen

Pada Pemilu 2014, pemilih Indonesia mendapat sumber informasi politik secara transparan dan kritis, khususnya yang berkaitan dengan para calon legislatif yang jumlahnya mencapai 6000-an orang untuk DPR RI. Gerakan sosial ini diprakarsai oleh sejumlah kelompok yang peduli dengan perubahan politik pada lembaga legislatif yang selama ini dipandang sangat korup. Maka ada niat untuk membuka informasi sebanyak mungkin terkait dengan calon anggota DPR tersebut sehingga masyarakat tidak salah pilih. Berikut hasil observasi terhadap sejumlah gerakan pendidikan politik dari warga untuk warga ini.

Sejumlah gerakan *grassroot* ini diprakarsai oleh masyarakat yang sadar akan peran strategis media baru dalam kehidupan masyarakat secara khusus pada bidang politik. Sifat aksesibilitas



media baru yang tanpa batas dengan karakter pemilih pemula yang adalah sadar teknologi, menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya konsolidasi demokrasi elektoral di Indonesia.

Setidaknya ada tujuh bentuk aplikasi media baru pada komunikasi politik mikro secara horizontal antara warga dengan warga negara yang lainnya, yang juga dibentuk secara swadaya oleh warga negara. Komunikasi politik mikro yang mengubah struktur dan pola komunikasi politik ini akan dijelaskan secara ringkas berikut ini.

a. Vote Cerdas BDG (votecerdas.org)

VoteCerdasBDG adalah sebuah inisiatif warga Bandung untuk membantu sesama warga agar dapat melunasi tugas kewargaannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. VoteCerdasBDG memberi penonjolan khusus menyangkut para calon legislatif DPRD Kota Bandung. Tampilan VOTECERDASBDG terlihat cukup menarik seperti pada gambar. Adapun data yang disediakan adalah foto, nama, data pribadi lengkap, dan rate transparansi tokoh.



Gambar 2: Tampilan Depan VOTECERDAS BDG



b. Orang Baik(orangbaik.org)

Aplikasi ini memuat biodata dan kemampuan para calon legislatif pada Pemilu 2014 dengan sistem skor. Data yang tersedia seperti foto, data diri, data politik, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman, serta skor penilaian tokoh yang didasarkan pada kriteria.

Aspek menarik pada kelompok ini adalah adanya sistem penilaian yang dihitung berdasarkan beberapa faktor, yaitu: Tingkat Pendidikan (30%), Tingkat Universitas (20), Pengalaman Pekerjaan (15), Pengalaman Organisasi (15), Umur (15), dan Wawasan akan lingkungan (5). Sesuai dengan olah data yang mereka buat, terlihat bahwa skor tertinggi yang dicapai oleh calon legislatif adalah 70, dan terendah adalah 0 dengan jumlah yang sangat dominan.

c. Bersih 2014 (bersih2014.net)

Media komunikasi ini dibentuk oleh sejumlah LSM (Kontras, ICW, WALHI, PSHK, dan KPA), yang gelisah dengan pencalonan kader partai politik untuk ikut Pemilu2014. Sejumlah informasi menarik dan kritis disediakan oleh kelompok ini khususnya panduan memilih caleg bersih.

Daftar nama caleg yang ada pada website ini adalah nama-nama yang dianggap bersih dan kredibel khususnya dari sudut pandang hak asasi manusia. Adapun data yang tersedia pada media ini adalah nama, nomor urut, dan CV yang terhubung ke website KPU.



d. Check Your Candidates (checkyourcandidates.org)

Sebuah media komunikasi politik untuk membantu pemilih mengenali rekam jejak calon anggota legislatif berusia di bawah 40 tahun. Pemilih muda mempunyai informasi yang cukup untuk menentukan pilihan di bilik suara. Sejumlah data tersedia adalah : foto, nama, nomor urut, pendidikan pekerjaan, dan link berita terkait tokoh tersebut, serta komentar pengunjung wesite terhadap tokoh yang ditampilkan.



Gambar 3: Tampilan Depan “Orang Baik”

e. Mata Massa (matamassa.org)

Kelompok ini menyediakan aplikasi pemantauan pemilihan umum legislatif dan presiden 2014 dan 2019 untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Aplikasi MataMassa dapat diunduh di telepon selular berbasis iOS, Android, maupun BlackBerry.



Data : daerah, tokoh atau partai, dan pelanggarannya.

f. Rumah Pemilu (rumahpemilu.org)

Media informasi dan komunikasi tentang pemilu. Media ini didedikasikan buat masyarakat luas, khususnya para pemangku kepentingan pemilu. Menjadi wahana interaksi dan komunikasi antar pemangku kepentingan pemilu, dengan misi meningkatkan kualitas proses dan hasil pemilu

g. Jari Ungu (jariungu.org)

Situs ini dibangun sebuah tim, semuanya bukan politisi, bukan pengamat politik, bukan anggota atau simpatisan partai tertentu, tetapi rakyat biasa yang sejak pasca Pemilu Legislatif 2009 membutuhkan media komunikasi dengan para anggota parlemen yang sudah terpilih mewakili daerah kami. Data: foto, nama caleg, dapil, dan link berita tentang tokoh.

Keseluruhan bentuk platform ruang pendidikan politik warga ini diciptakan oleh warga sendiri dengan satu kesamaan yaitu warga dapat mengenali calon wakilnya sebelum mereka memilih. Meskipun ada nilai yang ingin diperjuangkan dengan memilih dan menonjolkan informasi tertentu terkait dengan tokoh, namun keberpihakan yang terlembaga antara kelompok tersebut dengan para caleg tidak ada. Sehingga imparialitas penggiat sosialisasi politik *online* ini tetap terjamin.





5 Panduan Memilih Caleg Bersih

1. Pilihlah caleg yang tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum. Ingat tidak semua kejahatan dan kebohongan diproses secara hukum karena penegak hukum takut dan korup, maka kamu-lah yang menjadi hakim utk menilai orang tersebut pantas atau tidak menjadi anggota legislatif.
2. Pilihlah orang yang benar-benar anda yakin pernah berbuat kebaikan untuk banyak orang alias berpengalaman membela kepentingan rakyat.
3. Pilihlah orang yang mempunyai cita-cita membuat kamu dan bangsa Indonesia bisa mendekatkan diri pada keberpihakan bagi orang miskin, mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu dan mendorong persahabatan bukan permusuhan.
4. Jangan percaya pada janji-janji, jangan terpengaruh pada poster, iklan di televisi atau bahkan jangan jual suara anda karena uang atau janji harta benda.
5. Jangan pernah takut untuk bertanya, mencari tahu siapa calon yang kamu akan pilih. Diskusikan dengan tetangga, teman, atau siapapun. Atau anda bisa hubungi KontraS di tip 021-3926983 atau kunjungi kami di

Website: www.Bersih2014.net
 Twitter @Bersih2014
 FB: Bersih2014

Gambar 4: Tampilan Depan Bersih 2014



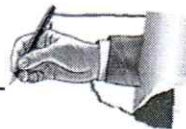
Media baru dapat memberi kontribusi yang besar bagi demokrasi. Kontribusi tersebut berupa terbentuknya ruang publik yang universal, bisa diakses oleh siapa saja. Sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan untuk menyuarkan aspirasinya. Di sisi lain, media baru mengubah komunikasi politik yang selama ini cenderung *top-down*, menjadi *bottom up* dan *decentralized*. Pemerintah juga dapat makin membuka ruang bagi masyarakat lewat program *e-government* untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Perubahan ini pada akhirnya akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan modal bagi terwujudnya demokrasi yang substantif bagi suatu bangsa.

Indonesia sendiri masih menghadapi sejumlah kendala dalam hal implementasi media baru pada bidang politik. *Pertama*, persoalan kesenjangan teknologi khususnya antara desa dan kota. *Kedua*, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang potensi sekaligus konsekuensi dari media baru sendiri. Untuk itu diperlukan literasi media yang memadai. *Ketiga*, para Elit politik belum mampu menggunakan media baru sebagai sarana kampanye politik dan komunikasi politik mereka karena rendahnya tingkat adopsi teknologi di tingkat Elit politik.

Di sisi lain, bisa jadi mereka melihat bahwa cara tersebut belum efektif untuk menjangkau penduduk Indonesia yang sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Tetapi walaupun demikian, mestinya pada Elit politik bisa menggunakan media baru tersebut untuk penyebarluasan pemikiran politik mereka,



mencari simpatisan, menampung aspirasi, bahkan mengumpulkan donasi secara online seperti yang diterapkan Barack Obama. Karena dengan memperhatikan data pemilih pada Pemilu dari tahun ke tahun dari data Survei LIPI ada peningkatan hingga 40% pemilih pada Pemilu 2019 adalah pemilih muda atau kaum milenial, yang secara demografis mereka adalah orang-orang yang terdidik, kritis, aktif, serta sangat melek internet. Tren saat ini menunjukkan harapan yang positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia pada pemilu mendatang dengan hadirnya media baru dalam mengubah struktur dan pola komunikasi politik baik secara horizontal maupun secara vertikal.



REFERENSI

A. Buku

- Anshoriy Ch, HM. Nasrudin. (2008). *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*, Yogyakarta: LkiS
- Arrianie, Lely, 2010, *Komunikasi Politik: Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*, Bandung, Widya Padjadjaran
- Barber, Benjamin. (1990). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Bohman, James. (1996). *Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Birch, Anthony Harold. (2001). *Concepts and Theories of Modern Democracy*, Second Edition, London: Routledge
- Deddy Mulyana. (2001). *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Flew, Terry. (2005). *New Media, An Introduction*, second edition. Australia: Oxford University Press.
- Gavriel, Salomon. (1997) "Of Mind and Media, How Culture's Symbolic Forms Affect Learning and Thinking" dalam *Bloomington* Volume 78 Iss. 5 Tahun 1997 h. 375-380
- Habermas, Jurgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity Press
- Hachten, William A. (1981). *The World News Prism: Changing Media, Clashing Ideologies*, 2nd edition. United State of America: Iowa State University Press.
- Held, David. (1995). *Democracy and the Global Order*. California:



Standford University Press.

Heinrich Best, Heinrich & Higley, John, eds. (2018) *The Palgrave Handbook of Political Elites*, London: Palgrave MacMillan

Higley, John. (2018) "Continuities and Discontinuities in Elite Theory" in book Heinrich Best and John Higley, *The Palgrave Handbook of Political Elites*, London: Palgrave MacMillan

Kaid, L. L. (2004). (n.d.). *Political communication*.

Körösenyi, A. (2018). "Political Elites and Democracy" In book Heinrich Best and John Higley, *The Palgrave MacMillan Handbook of Political Elites*, London: Routledge.

Kuntjaraningrat. (2016). *Penganyar Ilmu Antropologi*, Jakaftrta : PT Rineka Cipta

Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi, Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Widya Padjadjaran:
Douglas, Mary, 1973, *Natural Symbols, Explorations in Cosmology*, London, Routledge

Lasswell, H. (1948). *The structure and function of communication in society*. New York.

Makhasin, L. (2016). "Orientasi ideologi dan pragmatisme politik model pembentukan koalisi dalam pilkada serentak di Jawa Tengah 2015", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234.

McNair, Brian. (2003). *An Introduction to Political Communication*, Third edition. London & New York: Routledge.

McQuail, Denis & Windahl, Sven. (1993). *Communication Models*, second edition. London & New York: Longman.

Mills, C. Wright. (1956). *The Power Elite*,

Mughan, Anthony & Gunther, Richard. (2000). "The Media in



Democratic and Nondemocratic Regimes: A Multilevel Perspective." Dalam Gunther, Richard & Mughan, Anthony (eds), *Democracy and the Media, A Comparative Perspective*. United Kingdom: Cambridge University Press, hal. 1-27.

Nimmo, Dann, (2011). *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, Jakarta : PT Remaja Rosda Karya

Nugroho, Oki Cahyo, (2015). *Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Budaya* dalam Jurnal Aristo Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015, h. 4

Pavlik, John V. (1996). *New Media Technology, Cultural and Commercial Perspectives*. USA: Allyn and Bacon.

Sen, Krishna and Hill, David. (2007). *The Internet in Indonesia's NewDemocracy*. USA and Canada: Routledge.

Siebert, Peterson, & Schramm. (1963). *Four Theories of the Press*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Sparks, Colin. (2001). "The Internet and the Global Public Sphere." Dalam Bennett, W. Lance & Entman, Robert M. (eds). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Sphere in Bennett, W. Lance & Entman, Robert M. (eds). (2001) *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press.

Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Van Dijk, Jan. (2000). "Models of Democracy and Concepts of Communication." In book Van Dijk, Jan & Hacker, Kenneth L. (eds). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication

Van Dijk, Jan & Hacker, Kenneth L. (eds). (2000). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication



Varma, SP, (1987). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pres

B. Jurnal

Baxter, Hugh. (1987). System and life-world in Habermas's Theory of Communicative Action. *Theory and Society*, Vol. 16, No. 1 (Jan.), pp. 39-86.

Dahlberg, Lincoln. (2004). The Habermasian public sphere: A specification of the idealized conditions of democratic communication. *Studies in Social and Political Thought*, 10, 2-18.

Dahlgren, Peter. (2005). "The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation." *Political Communication*, 22: 147-162.

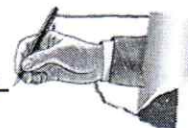
Habermas, Jurgen. (1974). "The Public Sphere: An Encyclopaedia Article." *New German Critique* 3, Autumn, hal. 49-55

Rangga Galura Gumelar, Ikhsan Ahmad, Iman Mukhroman, (2021), "Pengaruh transaksional elit politik terhadap model komunikasi politik pilwalkot Serang 2018", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Volume 9, No. 1, Juni 2021, hlm. 94-107

Solihah, R. (2016), "Politik transaksional dalam pilkada serentak dan implikasinya bagi pemerintahan daerah di Indonesia", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 97-109

Sulaiman, A. I. (2013), *Komunikasi Politik dalam demokratisasi. Observasi*, 11(2), 119-132

Susanto, E. H. (2013), "Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum", *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 163-172



C. Website

- Bonham, G. M. et. al. (2001). *The transformational potential of E-government: The role of political leadership*. Electronic Governance and Information Policy (Panel 9-1) at the 4th Pan European International Relations Conference of the European Consortium for Political Research. Retrieved, <http://www.maxwell.syr.edu/maspages/faculty/gmbonham/ecpr.htm>, diakses 3 Juli 2021
- Dryzek, John S. (2003). "Deliberative Democracy in Divided Societies: Alternatives to Agonism and Analgesia." Research School of Social Science, Australian National University. Diakses dari: http://sopol.anu.edu.au/pdf-files/Dryzek_divided.pdf
- Gibson, Rachel K. (2005). "Online Participation in the UK: Testing a 'Contextualised' Model of Internet Effects." *Political Studies Association*. Diakses dari: http://www.esri.salford.ac.uk/ESRCResearchproject/papers/gibson_et_al_2005_bjpir.pdf
- Mayfield, Anthony. (2008). What is social media? Diakses dari: <http://www.iCrossing.com/ebooks>, 23 Juli 2021
- Sujoko, Anang, (2018). "Komunikasi Politik Kaum Elite: Role Model sebuah Kegaduhan?", <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/169586/komunikasi-politik-kaum-elite-role-model-sebuah-kegaduhan>, diakses 11 Agustus 2021
- Sulaeman, A. (2017). "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah". *CosmoGov*, 1(1), 12. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.1185>, diakses 12 Agustus 2021



<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/07/0107013/Pemungutan.Suara.di.Hongkong.Ricuh.Celetukan.Panitia.Memperparah.Situasi>, diakses 3 Juli 2021

<http://my.barackobama.com/page/content/ofasplashflag/>, diakses 3 Juli 2021

<http://www.votecerdas.org/>, diakses 3 Juli 2021

<http://bersih2014.net/>, diakses 3 Juli 2021

<http://www.orangbaik.or/>, diakses 3 Juli 2021

<http://www.matamassa.org/>, diakses 3 Juli 2021

<http://www.rumahpemilu.org/>, diakses 3 Juli 2021

<http://www.checkyourcandidates.org/>, diakses 3 Juli 2021



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE, M.Si, seorang Politisi dan juga Akademisi. Darah pendidikan mengalir padanya dari ayah seorang Guru besar Fakultas Hukum UGM, almarhum Prof. Bambang Poernomo SH. M.Hum., dan Ibu yang juga seorang Guru, Dra. Roosmaniar.

Saat ini menjabat Direktur Sekolah Pascasarjana Usahid Jakarta. Menyelesaikan S1 pada studi Ilmu Ekonomi UII Yogyakarta (1982-1986) dan Ilmu Hubungan Internasional UGM Yogyakarta (1983-1987). Memperoleh gelar Magister Kajian Perempuan di Universitas Indonesia Tahun 1997 dan Doktor Dakwah Ilmu Komunikasi Tahun 2011, di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Ketua Umum dan Pendiri Dewan Pimpinan Pusat Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Aktifis Partai Golkar, pernah menjadi wakil sekjen dan Ketua DPP Parta Golkar, dan Ketum Perempuan MKGR, serta Ketua perempuan MDI. Menjadi Ketua PKK dan Delta mas Aceh.

Dan aktif di Seminar Nasional dan Internasional tentang *Woman and Politic*, Pendidikan, dan Kepemudaan. Menulis tentang *Women's Political Communications : Assessing Leadership In Queen Safiatuddin In Aceh Darussalam In The 17th Century* (Jurnal Komunikasi, 2016); dan *Perspektif Baru Groupthink: Perbedaan Tingkat Pendidikan dalam Proses Pengambilan Keputusan Kelompok* (2015).

Buku yang telah diterbitkan; *Setiap Orang Mencari Alamatnya : Perjalanan Spiritual* (Mizan), *Perjalanan Seorang*



Musafir : Biografi di Aceh (Mizan), *Public Speaking* (Cahaya Gorup); Etika Kepribadian Muslim (PKK Aceh); Komunikasi Politik Perempuan di DPRD DKI Jakarta (Orbit); Komunikasi Politik Partai Golkar Periode 2004-2009 (KitaBaca); Komunikator Politik (Panduan Pileg dan Pilkada); Kiprah Perempuan Parlemen (2019) sebuah buku pengalaman sebagai anggota DPR RI 2014-2019.

Selama di DPR aktif dalam panitia kerja yang menghasilkan legislasi UU Pemajuan Kebudayaan, UU Serah terima karya cetak dan elektronik, serta menjadi wakil ketua UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) yg melahirkan BRIN.

Lulusan Lemhannas PPSA XVIII, dan 2 (dua) buku diterbitkan Internasional oleh Amazon, Linda Poernomo dari presenter ke parlemen (sebagai penyiar TVRI tahun 80 sampai 90) serta *Never give Up* (buku-bukunya tersimpan juga *library congress*).

Aktif literasi ini membuat perpustakaan keliling di daerah pemilihannya TBM (Taman Bacaan Marlinda). Mendapat bintang penghargaan dari Presiden dalam bidang Keluarga Berencana.

Semoga cita- citanya meraih jabatan fungsional tertinggi di dunia pendidikan sebagai Guru Besar dapat terwujud, dengan kembali ke kampus setelah pengabdian di legislative.



KOMUNIKASI ELIT POLITIK



Secara sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*. Suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa elite adalah produk dari masyarakat. Hubungan antar elite senantiasa terjalin komunikasi sehingga kreasi maupun semangat dari suatu generasi dilanjutkan atau diterjemahkan ke dalam bentuk yang baru oleh generasi berikutnya.

Buku ini membahas tentang komunikasi elit politik di Indonesia yang dinamikanya sangat kompleks. Bagaimana pola dan struktur komunikasi elit politik dapat dibaca dalam buku ini.



Penerbit
Nizamia Learning Center
Ruko Valencia AA 15 Gemurung, Gedangan - Sidoarjo
Telp. 031 - 8914874
Email : nizamiacenter@gmail.com

ISBN 978-623-265-631-4



9 786232 656314